

ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI JAWA TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan Jawa Timur, pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap distribusi pendapatan Jawa Timur dan implikasi pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan. Metode penyampelan (sampling) menggunakan metode purposif sampling dengan kriteria: Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, Laporan keuangannya lengkap (tanpa melihat pendapat akuntan terhadap laporan keuangan). Dan didapat sampel 29 kabupaten dan 9 kota dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan APBD Jawa Timur, dan PDRB Jawa Timur dari pooling data yaitu cross-sectional data yang terdiri dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan time series data selama 7 tahun (2007 - 2013). Teknik analisis path analysis, dengan variabel eksogen belanja langsung dan tidak langsung diproksi dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Serta variabel endogen pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang diproksi dengan belanja langsung dan tidak Langsung (X1) dan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang diproksi dengan Belanja Langsung (X1) Pertumbuhan ekonomi dan Distribusi pendapatan diproksi dengan Belanja tidak langsung (X2).

Dihasilkan: Secara simultan atau bersama-sama variabel belanja langsung dan tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara Parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi pendapatan. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa timur berpengaruh secara langsung. Secara parsial variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi pendapatan. Secara parsial variabel belanja langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi pendapatan.

Penerbit YPSIM  +62 8159 5168 18
 ypsimbanten@gmail.com
 Ypsim Banten
 www.ypsimbanten.com
 Kavling Muntiri Blok A. 12, Ciracas
Kota Serang Provinsi Banten



Humaidah Muafiqie

ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI JAWA TIMUR



Humaidah Muafiqie



ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI JAWA TIMUR



**ANALISIS PENGARUH BELANJA
LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI JAWA TIMUR**

Penulis :
Humaidah Muafiqie



**ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI JAWA TIMUR**

2022 | 00330

Penulis

Humaidah Muafiqie

Editor

Abdul Rosid, S.E

ISBN: 978-623-6356-89-0

Desain Sampul

Lukas Liani, S.Psi.

Layout

Asep Nugraha, S.Hum.

Cetakan Pertama Januari 2022

vi + 203 hlm ; 14.8 x 21 cm

Penerbit

Yayasan Pendidikan dan Sosial
Indonesia Maju (YPSIM) Banten
Kavling Aji Said – Muntil Permai
Blok A.12 Lingkungan Muntil
Kota Serang Provinsi Banten
E-mail: Ypsimbanten@gmail.com
Website : www.ypsimbanten.com

WhatsApp: 0815 9516 818
ANGGOTA IKAPI No. 039/BANTEN/2020
(IKATAN PENERBIT INDONESIA)

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan cinta serta kasih sayangnya kepada kita semua. Dan tidak ketinggalan pula sholawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari jaman kegelapan menuju jaman terang menerang seperti saat ini.

Alhamdulillah atas kehendaknya akhirnya buku Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Implikasinya Terhadap Distribusi Pendapatan Di Jawa Timur hasil dari penelitian Disertasi ini telah terbit, dan semoga dengan terbitnya buku ini menjadi menambah wawasan serta menambah minat membaca untuk para pembaca.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam buku ini, maka dari itu kritik serta saran sangat kami harapkan sehingga kami bisa lebih baik kedepannya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PENELITIAN.....	19
A. Landasan Teori	19
B. Penelitian Terdahulu	90
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	101
A. Kerangka Konseptual.....	101
B. Hipotesis	109
BAB IV METODE PENELITIAN	110
A. Desain Penelitian	110
B. Definisi Konseptual.....	110
C. Definisi Operasional Variabel.....	111
D. Populasi Sampel Ukuran Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	112
E. Jenis Data.....	113
F. Ruang Lingkup Penelitian	113
G. Teknik Analisis Data.....	113

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	127
A. Gambar Hasil Penelitian	127
B. Hasil Penelitian.....	129
C. Analisis Hasil Penelitian	167
D. Pembahasan	175
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	190
A. Kesimpulan.....	190
B. Saran	193
DAFTAR PUSTAKA	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan selalu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan disertai pemerataan pendapatan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya konsumsi masyarakat sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan. Kenyataannya, tingkat kesejahteraan masyarakat sulit untuk dikatakan merata karena beberapa hal antara lain baik karena masalah internal seperti adanya persaingan antar wilayah, baik antara wilayah regional maupun nasional. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dikarenakan oleh berapa besar pengeluaran pemerintah dan investasi. Pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif.

Kenaikan investasi akan memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi karena kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadi kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan modal ini akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya apabila terjadi

penurunan investasi maka maka Produk Domestik Bruto juga akan mengalami penurunan, karena penurunan investasi mengindikasikan telah terjadi penurunan penanaman modal atau pembentukan modal. Penurunan pembentukan modal ini akan mengakibatkan menurunnya produksi barang dan jasa, dan penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang semakin meningkat di bandingkan Propinsi–propinsi lain di pulau Jawa, mengindikasikan bahwa perekonomian Jawa Timur terus berkembang dengan baik dan mngidikasikan bahwa pkemakmuran bisa diraih oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini bisa di lihat pertumbuhannya yang meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bisa dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa
2008-2013 (persen)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
JawaTimur	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27	6,11
DKI Jakarta	6,23	5,02	6,50	6,72	6,55	6,06
Jawa Barat	6,21	4,19	6,20	6,48	6,21	5,81
Jawa Tengah	5,61	5,14	5,84	6,01	6,37	5,40
Banten	5,77	5,45	6,08	6,43	6,13	6,55
Yogyakarta	5,03	4,43	4,88	5,10	5,33	5,86

Sumber :Badan Pusat Statistik 2014

Berdasar tabel 1 bisa ditunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mulai pada tahun 2008 sebesar 5,94 persen, di bandingkan dengan provinsi DKI Jakarta sebesar 6,23 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang paling besar, kemudian di susul oleh propinsi Jawa Barat sebesar 6,21 persen, selanjutnya provinsi Jawa Timur dan di susul oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,61 persen dan di lanjutkan propinsi Banten sebesar 5,77 dan di urutan terakhir adalah propinsi Yogyakarta.

Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa mengalami penurunan, termasuk juga provinsi Jawa Timur, di urutan pertama pertumbuhan ekonomi di duduki oleh propinsi Banten sebesar 5,45 persen, selanjutnya di susul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan sebesar 5,14 persen, provonsi DKI Jakarta menyusul di peringkat ke tiga pertumbuhan ekonomi di Jawa sebesar 5,02 persen dan di lanjutkan oleh provinsi Jawa Timur sebesar 5,01 persen, kemudian Provinsi Yogyakarta sebesar 4,43 persen dan disusul oleh propinsi Jawa Barat sebesar 4,19 persen

Pada Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkembang paling pesat di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur dari 5,01 persen, naik menjadi 6,68 persen, yang kemudian di susul oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,50 persen, kemudian Provinsi Jawa Barat sebesar 6,20 persen, Provinsi

Banten pertumbuhan ekonominya sebesar 6,08 persen, dan di lanjutkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,84 persen, terakhir dari Provinsi Yogyakarta sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa secara keseluruhan mengalami kenaikan.

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur mengalami tren yang positif di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,22 persen dan lebih besar dari tahun 2010 sebesar 6,68 persen. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kedua dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau Jawa yaitu sebesar 6,72 persen, disusul secara berturut-turut oleh Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, tertinggi masih di pegang oleh Jawa Timur yaitu sebesar 7,27 persen, di bandingkan tahun lalu pertumbuhannya mengalami kenaikan tipis yaitu mencapai mencapai 0,50 persen, di susul di tempat kedua adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 6,55 persen, tetapi di bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,12, kemudian disusul secara berturut-turut dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta. Hampir Semua provinsi provinsi pada tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, termasuk Pulau Jawa kecuali Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Perumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2013 mengalami pertumbuhan secara kumulatif sebesar 6,55

persen. Pertumbuhan ekonomi ini bisa dibilang cukup baik karena pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melampaui pertumbuhan perekonomian Provinsi lain di Pulau Jawa, dimana DKI Jakarta hanya tumbuh sebesar 6,11 persen, Jawa Barat 6,06 persen dan Jawa Tengah 5,81 persen.

Secara absolut kinerja ekonomi Jawa Timur baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan yang signifikan, peningkatan itu di sumbang oleh sektor-sektor yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur mulai dari sektor pertanian, pertambangan, Industri pengolahan, Listrik, gas, dan air bersih sampai pada jasa-jasa yang setiap tahunnya mengalami perubahan dan mengakibatkan pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara absolut bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2009-2013

Tahun	PDRB ADHB (Miliyar Rp)	PDRB ADHK (Miliyar Rp)	Pertumbuh an Ekonomi Provinsi %	Pertumbu han Ekonomi Nasional %
2009	86.848	320.861	5,81	4,55

2010	778.566	342.281	6,68	6,10
2011	884.503	366.984	7,22	6,50
2012	1.001.721	393.666	7,27	6,23
2013	1.136.330	419.430	6,55	6,78

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014

Berdasar tabel 2 bisa di lihat pada tahun mulai tahun 2009 PDRB Provinsi Jawa Timur mencapai angka 86.848 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 778.566 miliar rupiah, di susul pada tahun 2011 PDRB Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi sebesar 884.503 miliar rupiah dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 1.001.721 triliun rupiah dan terakhir pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 1.136.330 triliun rupiah. Angka-angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur ini secara persentase melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Sampai tahun 2013 PDRB Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan menjadi 1.136.33 Triliun Rupiah, berada pada urutan pertama secara Nasional, disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Secara Nasional pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih mendominasi bahkan lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional, yaitu pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 4,55 persen, di susul pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,68 persen sedangkan secara Nasional pertumbuhan ekonomi hanya mencapai angka 6,10 persen, ditahun 2011

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 7,22 persen sedangkan secara Nasional pertumbuhan ekonomi mencapai 6,50 persen, kemudian pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai angka 7,27 persen. Posisi ini diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang berada di angka 6,23 persen dan terakhir pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai angka 6,55 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang berada pada angka 5,78 persen.

Pulau Jawa masih merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu sebesar 58,35 persen dimana dari Pulau Jawa sendiri pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama di bandingkan dengan Provinsi-Provinsi lain yaitu pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada posisi 5,01 persen masih dibawah DKI Jakarta yaitu sebesar 5,02 persen. Tetapi pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,68 persen, sedangkan DKI Jakarta hanya 6,50 persen dan pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur naik menjadi 7,22 persen. Angka ini masih lebih besar dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat diangka 6,71 persen dan 6,48 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2012 berada pada angka 7,27 persen melebihi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang hanya sebesar 6,55 persen dan Provinsi Jawa Barat yang hanya berada pada angka 6,21 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Timur menurun menjadi 6,11 persen tetapi masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang berada pada angka 6,06 persen dan dibawah Provinsi Banten yang pertumbuhan ekonominya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,55 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2012 mencapai 7.22 persen, dan diharapkan pada tahun 2013 bisa mencapai angka 7.22 persen, ternyata angka ini tidak bisa dcaapai oleh Jawa Timur dan harus menyerah pada angka 6.55 persen saja, yaitu dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 6,78 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini karena adanya berbagai bencana seperti banjir, gunung meletus serta infr struktur yang rusak. Selama 2013 Jawa Timur juga di hadapkan pada situasi ekonomi yang kurang menguntungkan yaitu kenaikan inflasi, masih tingginya suku bunga Bank, serta kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif listrik.

Adapun sektor-sektor penyumbang PDRB adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor lidtrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, dan yang terakhir sektor jasa-jasa. Sumbangan sektor sektor ekonomi di Jawa Timur bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 3
Sektor-Sektor Penyumbang PDRB Jawa Timur
(dalam persen Tahun 2009 - 2013)

No	Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	3,92	2,23	2,53	3,44	1,59
2	Pertambangan	6,92	9,8	6,08	4,47	3,35
3	Industri Pengolahan	2,80	4,32	6,06	6,34	5,59
4	Listrik, gas dan air bersih	2,72	6,43	6,25	6,23	4,74
5	Bangunan	4,25	6,64	9,12	7,17	9,08
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,58	10,67	9,81	10,05	8,61
7	Pengangkutan dan Telekomunikasi	12,98	10,07	11,44	9,78	10,43
8	Keuangan, persewaan dan jasa	5,30	7,27	8,18	8,01	7,08
9	Jasa-jasa	5,76			4,34	
PDRB		5,01			6,68	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014

Berdasar tabel 3 di tunjukkan bahwa pada Tahun 2009 sektor pertanian menyumbang sebesar 3,92 persen, kemudian sektor pertambangan sebesar 6,92 persen, sektor industri pengolahan sebesar 2,80 persen, di lanjutkan dari sector listrik, gas, dan air bersih sebesar

2,72 persen, dari sector bangunan menyumbang sebesar 4,25 persen, sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 5,58 persen, selanjutnya dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi sebesar 12,92 persen, ini adalah sektor yang paling besar untuk PDRB provinsi Jawa Timur. kemudian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar 5,30 persen dan di ikuti sektor jasa-jasa sebesar 5,76 persen, dan pada tahun ini PDRB Provinsi Jawa Timur dari sektor-sektor tersebut sebesar 5,01 persen.

Pada Tahun 2010 sektor pertanian menyumbang sebesar 2,23 persen, kemudian sektor pertambangan sebesar 9,8 persen, sektor industri pengolahan sebesar 4,32 persen, dilanjutkan dari sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6.43 persen. Dari sektor bangunan menyumbang sebesar 6,64 persen, sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 10,67 persen. pada sektor ini kenaikannya hampir seratus persen menyumbang PDRB Provinsi Jawa Timur, dan di lanjutkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi sebesar 10,07 persen, sektor ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,91 persen. kemudian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar 7,27 persen, dan di ikuti sektor jasa-jasa sebesar 4,34 persen, dan pada tahun ini PDRB Provinsi Jawa Timur dari sekkor-sektor tersebut sebesar 6,68 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 1,67 persen.

Pada Tahun 2011 sektor pertanian menyumbang sebesar 2,53 persen, kemudian sektor pertambangan

sebesar 6,08 persen, sektor industri pengolahan sebesar 4,32 persen, di lanjutkan dari sector listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,43 persen, dari sektor bangunan menyumbang sebesar 9,12 persen, sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 9,81 persen, di lanjutkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi sebesar 11,44 persen, kemudian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar 8.18 persen, dan di ikuti sektor jasa-jasa sebesar 5,08 persen, dan pada tahun ini PDRB Provinsi Jawa Timur dari sektor-sektor tersebut sebesar 7,22 persen..

Pada Tahun 2012 sektor pertanian menyumbang sebesar 3,44 persen kemudian sektor pertambangan sebesar 4,47 persen, sektor industri pengolahan sebesar 6,34 persen, dilanjutkan dari sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,23 persen. Sekkor bangunan menyumbang sebesar 7,17 persen, sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 10,05 persen, di lanjutkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi sebesar 9,78 persen, kemudian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar 8,01 persen dan di ikuti sektor jasa-jasa sebesar 4,82 persen, dan pada tahun ini PDRB Provinsi Jawa Timur dari sektor-sektor tersebut sebesar 7,27 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2013 didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 18,61 persen. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan mayoritas pendapatan warga Jawa Timur hanya mampu memberikan sumbangan terredah terhadap PDRB

Jawwa Timur. Hal ini karena mengalami kendala dari faktor alam yaitu berupa bencana alam banjir, gunung meletus dan kerusakan infrastruktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menembus angka 7.5 persen, harus pasrah diangka 6,55 persen saja.

Namun meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 menurun, pertumbuhan ekonomi ini masih berada pada urutan ketiga secara Nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan positif dalam perkembangannya. Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi dan terbesar di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia Timur umumnya. Jawa Timur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kemajuan ekonomi Jawa Timur tidak terlepas dari peran para eksportir, karena itu Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota akan terus bersinergi dengan para pengusaha industri dan perdagangan untuk meningkatkan kerjasama guna mensejahterahkan rakyat.

Struktur perekonomian Jawa Timur 2013 masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 31,33 persen, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, masing-masing sebesar 26, 60 persen dan 14, 91 persen. Sebetulnya Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi ditahun 2013 meningkat dan bisa menembus angka 7,5 persen tetapi ternyata hal ini tidak

bisa tercapai dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ditahun 2013 hanya mencapai angka 6,55 persen. Jawa Timur sebagai pintu perdagangan Indonesia Timur banyak diuntungkan karena bisa menopaang pertumbuhan ekonomi, hal ini bisa dilihat pada struktur ekonomi Jawa Timur pada tabel 4.

Tabel 4
Struktur PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
2009-2013 (Persen)

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
1) Pertanian	16,39	15,75	15,38	15,42	14,91
2) Pertambangan	2,17	2,19	2,24	2,08	2,00
3) Industri Pengolahan	28,04	27,49	27,12	27,11	26,60
4) Listrik, gas dan air bersih	1,82	1,15	1,43	1,35	1,29
5) Bangunan	3,40	4,49	4,67	4,55	4,74
6) Perdagangan, Hotel, dan restoran	9,44	29,47	39,99	30,40	31,34

7) Pngangk utan dan telekomu niksi	5,69	5,52	5,66	5,70	5,94
8) Keuanga n persewaa n dan jasa	4,76	4,90	4,97	5,05	5,10
9) Jasa-jasa	8,29	8,55	8,55	8,35	8,09
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014

Berdasar tabel 4 ditunjukkan bahwa sumbangan terbesar pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran berturut turut mulai tahun 2010 sektor ini menyumbang 29,47 persen dan pada tahun 2011 sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat menjadi 39,99 persen dan pada tahun 2012 sektor ini mengalami penurunan menjadi 30, 40 persen dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 31,34 persen. Meskipun sektor perdagangan, hotel dan restoran pertumbuhannya menurun, namun masih menjadi primadona penyumbang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang menurun ini dikarenakan adanya berbagai bencana seperti banjir, letusan gunung dan rusaknya infrastruktur disamping adanya permasalahan lain yaitu adanya

kenaikan inflasi, kenaikan harga BBM dan masih tingginya suku bunga Bank serta naiknya Tarif Tenaga Listrik. Sektor pertanian yang merupakan mayoritas pendapatan masyarakat Jawa Timur mengalami kendala dari faktor alam.

Terdapat sekitar 124 daerah yang terancam bangkrut karena pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan karena rata-rata daerah mempunyai belanja pegawai diatas 60 persen dan belanja modal sebesar 1-15 persen (Gatra, 2013). Sedangkan 16 daerah lainnya mempunyai belanja pegawai diatas 70 persen. Jika kondisi ini tetap dibiarkan maka dalam tiga tahun mendatang, daerah tersebut akan mengalami kebangkrutan karena APBD hanya digunakan untuk memenuhi belanja pegawai . Posisi tertinggi ditempati Kabupaten Lumajang dengan belanja pegawai 83 persen dan belanja modal hanya 1 persen saja.

Menurut data LIPI (2013) terdapat 183 Kab/Kota yang terancam bangkrut. Sebelum kebangkrutan itu tiba, para penguasa di daerah itu sudah saatnya lebih transparan dan bertanggung jawab mengelola uang rakyat. Beberapa daerah mengalami kebangkrutan karena beban belanja pegawai yang terlalu tinggi sehingga berakibat pada tingginya belanja pegawai yang pada akhirnya anggaran untuk belanja modal dan belanja barang menjadi kecil sekali.

Data menunjukkan belanja pegawai Kabupaten Ponorogo mencapai 67,8 persen, belanja barang hanya 13%, dan belanja modal 13 persen. Dari total APBD Kab. Ngawi belanja pegawai mencapai 66,9 persen, belanja

barang 14 persen dan belanja modal 13 persen. Sedangkan Kabupaten Pacitan belanja pegawai mencapai 66,5 persen, belanja barang hanya 13 persen dan belanja modal 13 persen (FITRA, 2012). Masih menurut FITRA, ada empat kabupaten yang beban belanja pegawainya lebih dari 70 persen yang merupakan persentase tertinggi di Indonesia. Pada urutan pertama daerah yang mempunyai belanja pegawai tertinggi adalah Kabupaten Simalungun sebesar 74 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, peringkat selanjutnya adalah Kota Ambon 73 persen dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 73 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai dan terakhir Kabupaten Klaten sebesar 72 persen dana APBD habis digunakan untuk belanja pegawai (FITRA, 2013)

Padahal belanja modal dan belanja barang sangat diperlukan untuk pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara nasional, dari temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA (2013) banyak daerah lain yang belanja pegawai rata-rata mencapai 48 persen, dan rata-rata belanja modal hanya 24 persen, serta belanja barang rata-rata hanya 19 persen. Temuan FITRA (2013) Belanja pegawai yang tinggi ini antara lain disebabkan masih kentalnya nuansa nepotisme pegawai negeri sipil di daerah.

Selama ini pendapatan daerah tidak mampu menopang seluruh belanja daerah, sehingga pemerintah

daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Bisa saja APBD gagal ketika tidak bisa membiayai lagi pembangunan daerah karena anggaran yang ada hanya mampu mencukupi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan biaya operasional. Oleh karena itu penelitian ini di samping mengamati pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini juga mengamati implikasinya terhadap distribusi pendapatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas maka diformulasikan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Jawa Timur.
3. Bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap distribusi pendapatan Jawa Timur.
4. Bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah tersebut diatas maka diformulasikan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
2. Untuk menguji implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan Jawa Timur.
3. Untuk menguji pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap distribusi pendapatan Jawa Timur.
4. Untuk menguji pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap distribusi pendapatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi para praktisi dan akademisi yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan penguatan dan pengembangan teori khususnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Bagi praktisi khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan masukan untuk menerapkan kebijakan pengeluaran Pemerintah Daerah khususnya untuk alokasi peningkatan pendapatan daerah Jawa Timur.
3. Bagi peneliti selanjutnya dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bisa dikembangkan menjadi penelitian berikutnya misalkan dengan memasukkan variabel yang belum dipergunakan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi langsung diartikan pada indikator yang dihitung secara nasional yaitu Gross Domestic Product (GDP), tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya maupun tidak (Suryana, 2000 : 124). Demikian juga (Boediono, 1999 : 1-2) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penelitian ini mengamati pertumbuhan ekonomi di daerah (Provinsi Jawa Timur), sehingga menggunakan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sehingga makin tinggi pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat meskipun ada indikator lain yaitu distribusi pendapatan (Sukirno, 1996 : 33).

Pertumbuhan ekonomi juga bisa dikatakan merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional riil atau pendapatan nasional riil, sehingga perekonomian dikatakan tumbuh bila terjadi pertumbuhan output riil dan perubahan tersebut bersifat positif (Wijaya, 1990 : 262). Pertumbuhan

ekonomi merupakan perkembangan tingkat kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dari tahun ketahun sehingga untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional dari tahun ketahun begitu juga pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data PDB atau pendapatan output perkapita (Nanga, 2005 : 273).

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan karena pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Parameter tersebut menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dasar oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita jangka panjang sehingga persentase pertambahan output harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk, dan ada kecenderungan dalam jangka panjang pertumbuhan itu akan meningkat (Tarigan, 2004 : 44).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan

penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak (Arsyad, 2004 : 13). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan bobot PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 1999 : 132).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah: (1) Teori Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith; (2) Teori Neoklasik yang dipelopori oleh Solow-Swan; (3) Teori Keynes yang mendobrak Teori Klasik dan (4) Teori Modern yang dipelopori oleh Kuznets. Menurut Adam Smith (1776), proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistimatis, meliputi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Smith mengatakan bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, sehingga banyaknya sumber daya alam merupakan batas maksimum dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan berhenti bila sumber

daya alam sudah sepenuhnya digunakan secara maksimal. Jumlah penduduk merupakan sumber daya yang pasif dan akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan stok modal mempunyai peran sentral dalam proses pertumbuhan output dan makin besar stok modal akan semakin besar kesempatan untuk melaksanakan pembagian kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas perkapita. Disamping akumulasi modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu semakin meluasnya pasar dan adanya keuntungan diatas tingkat keuntungan minimum. Sedangkan aliran neoklasik menyatakan bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada yang bisa dikembangkan oleh manusia yaitu dengan menggunakan teknologi.

Perekonomian yang tidak ada pertumbuhan teknologinya, pendapatan dapat ditentukan dari besarnya modal dan tenaga kerja. Berdasarkan variabel dalam fungsi produksi ini ada dua model pertumbuhan yaitu model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi dan model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi.

a. Model Pertumbuhan Tanpa Perkembangan Teknologi.

Pendapatan akan meningkat bila setiap tenaga kerja mendapat modal peralatan yang lebih banyak dan proses ini disebut '*capital deepening*' namun tidak dapat terus-menerus

meningkat tanpa adanya pertumbuhan teknologi karena modal (seperti juga tenaga kerja) akhirnya akan meningkat dengan pertumbuhan yang semakin berkurang (diminishing return).

b. Model Pertumbuhan dengan Perkembangan Teknologi.

Model Neoklasik tanpa perkembangan teknologi kurang realistik untuk membuat analisis, supaya lebih realistis maka ditambahkan faktor perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Cara yang paling umum adalah memasukkan perkembangan teknologi sebagai elemen dalam fungsi produksi. Modal dan tenaga kerja diasumsikan dapat mengambil keuntungan dari adanya perkembangan teknologi, yaitu dengan adanya teknologi yang maju maka tenaga kerja akan bisa meningkatkan produktifitasnya sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih banyak dan bisa bersaing dengan produk lain.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada tersedianya faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Sehingga untuk menciptakan sejumlah output tertentu bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai kebutuhan. Jika modal yang digunakan lebih banyak maka jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih sedikit dan bila modal yang digunakan lebih sedikit maka tenaga kerja

yang digunakan lebih banyak sehingga dengan adanya fleksibilitas ini maka perekonomian akan mempunyai kebebasan dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

Solow-Swan mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh.

1) Akumulasi Modal

Akumulasi modal diperoleh dari tabungan dan investasi yang disisihkan dari bagian pendapatan waktu sekarang untuk dapat memperbesar produksi dan pendapatan di waktu yang akan datang. Pabrik, mesin, peralatan dan bahan baku yang baru semuanya akan meningkatkan persediaan modal fisik suatu bangsa (yaitu total nilai bersih semua barang modal fisik yang produktif), dan akan memungkinkan bagi tercapainya tingkat produksi yang lebih tinggi.

2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk yang juga mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja meskipun dengan tenggang waktu) secara tradisional dianggap merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar angkatan kerja maka semakin banyak pula tenaga kerja yang produktif, sementara jumlah penduduk yang lebih besar dapat meningkatkan luasnya pasar dalam negeri. Walaupun demikian, selayaknya

dipertanyakan apakah pesatnya pertumbuhan penawaran tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang yang surplus tenaga kerja itu memiliki pengaruh yang negatif ataukah positif atas kemajuan ekonomi untuk pembahasan pro dan kontra pertumbuhan penduduk bagi pembangunan ekonomi nasional.

3) Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi dapat disebut sebagai cara baru dan cara yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menanam jagung, membuat pakaian, ataupun membangun rumah. Terdapat tiga klasifikasi pokok kemajuan : yaitu yang netral, hemat tenaga dan hemat modal. Kemajuan teknologi yang netral dikaitkan dengan pencapaian tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor masukan yang sama, inovasi yang sederhana seperti adanya pemisahan tugas, sehingga setiap orang tidak mencoba untuk menghasilkan semua kebutuhan pokoknya, akhirnya menimbulkan spesialisasi di mana seseorang dengan hanya mengerjakan satu tugas tertentu saja, sementara yang lain memusatkan perhatiannya pada pekerjaan yang lain lagi.

Spesialisasi semacam ini seringkali menghasilkan total tingkat produksi yang lebih

tinggi dan jumlah konsumsi yang lebih besar bagi setiap orang, dilain pihak kemajuan teknologi itu dapat berupa kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat produksi yang lebih tinggi yang akan dapat dicapai dengan jumlah masukan tenaga kerja (modal) yang sama.

Teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi menurut Keynes. Berikut ini beberapa pemikiran dan konsep Keynes.

- a) Keynes mendobrak teorinya Klassik yang mengatakan bahwa kegiatan ekonomi selalu dalam keadaan equilibrium, produksi selalu menciptakan permintaan hasil produksi tersebut sehingga tidak mungkin terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, dimana kapasitas produksi digunakan secara penuh dengan adanya kesempatan kerja penuh. Pendapat aliran klassik sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada dalam dasa warsa 30 an, yaitu stagflasi dan pengangguran merupakan ciri kronis yang tidak berkesudahan.
- b) Underemployment equilibrium. Menurut Keynes, kondisi ekonomi yang selalu dalam kondisi keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja yang terjadi adalah kondisi ekonomi equilibrium tetapi banyak pengangguran karena kapasitas produksi

yang tersedia tidak bisa dimanfaatkan (yang oleh Keynes disebut sebagai underemployment equilibrium).

- c) Pentingnya peran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan terutama jika perekonomian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keseimbangan ekonomi harus diatur oleh pemerintah dan tidak bisa dibiarkan dan ditunggu untuk mencapai keseimbangan dengan sendirinya. Keynes menggunakan kebijakan fiskal dalam mempengaruhi jalannya perekonomian karena kebijakan fiskal sangat efektif meningkatkan output dan memberantas pengangguran
- d) Konsep teori Keynes merupakan teori tentang pendapatan dan kesempatan kerja, yang terdiri dari hasrat berkonsumsi, tingkat bunga dan efisiensi marginal dari investasi modal.
- e) Preferensi liquiditas (liquidity preference) yaitu bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek dan disesuaikan untuk menyeimbangkan dengan permintaan dan penawaran uang, karena pada dasarnya tingkat bunga merupakan opportunity cost dari memegang uang, maka orang akan menyesuaikan berapa banyak uang yang akan dipegang untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi.

- f) Keynes menyatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang bekerja maupun menganggur itu karena adanya tingkat upah nominal sehingga untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan cara menurunkan upah nominal lebih besar daripada tingkat inflasi.
- g) Menurut Keynes, tingkat tabungan harus lebih besar dari rencana investasi. (Djojohadikusumo : 1999 : 98).

Sejalan dengan Keynes maka Harrod dan Domar menganalisis dan melengkapi teori Keynes yang dianggap kurang lengkap karena tidak menganalisis masalah ekonomi jangka panjang. Harrod Domar menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, (1) perekonomian dalam keadaan full employment dan barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh, (2) perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, (3) besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, (4) adanya kecenderungan menabung yang tetap dari masyarakat.

Menurut Harrod dan Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya mengganti barang-barang modal

yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Sehingga jika perekonomian ingin tumbuh maka perekonomian harus menabung dan menginvestasikan proporsi tertentu dari output totalnya. Namun demikian sebetulnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata itu tergantung pada produktivitas dan investasi.

Teori pertumbuhan ekonomi yang keempat merupakan teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Kuznets, yang memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971 untuk kepeloporannya dalam menggunakan ukuran dan analisis mengenai tingkat pertumbuhan pendapatan nasional di negara-negara maju. Kuznets telah memberikan definisi pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai suatu kenaikan dalam jangka panjang kemampuan untuk meningkatkan kesediaan berbagai macam barang kebutuhan ekonomi bagi penduduknya (Jinghan, 2000 : 57).

Definisi tersebut memiliki tiga komponen pokok, yaitu bahwa (1) adanya peningkatan terus-menerus dalam keluaran atau produksi nasional merupakan manifestasi pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam jenis barang yang dibutuhkan

merupakan pertanda kematangan ekonomi, (2) kemajuan di bidang teknologi telah memberikan dasar atau prakondisi untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan – suatu kondisi yang penting tetapi tidak cukup hanya itu. Akan tetapi, untuk dapat mewujudkan potensi pertumbuhan yang inheren dengan pertumbuhan teknologi baru, maka (3) penyesuaian-penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus diciptakan. Pembaharuan atau inovasi dibidang sosial sama saja dengan bola lampu tanpa listrik: ada potensi tetapi tidak ada masukan pelengkapannya sehingga tidak menghasilkan apapun.

Teori modern ini menyatakan bahwa faktor produksi yang penting tidak hanya dilihat dari banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia, dan kemajuan teknologi, energi, bahan baku, dan kewirausahaan. Juga yang tidak bisa ditinggalkan dalam ekonomi modern adalah kualitas sumber daya manusia dan teknologi merupakan penentu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kualitas tenaga kerja tidak hanya ditentukan oleh pendidikan saja, tetapi juga ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Kewirausahaan merupakan faktor penting dalam perekonomian modern, karena kewirausahaan menunjukkan kemampuan

seseorang untuk melakukan inovasi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi modern adalah teknologi, yang dianggap sebagai faktor produksi yang dinamis yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi disamping faktor tenaga kerja yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan faktor yang sama-sama menentukan peningkatan produktifitas tenaga kerja dan diharapkan akan menentukan produksi yang dihasilkan oleh produsen (Tulus, 2009 : 68).

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan peningkatan kemampuan negara tersebut dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian kelembagaan yang dibutuhkan (Arsyad, 2004 : 221).

Kuznets memilah-milah enam ciri pokok sehubungan dengan proses pertumbuhan yang dialami oleh hampir semua negara maju dewasa ini (seperti Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang dan Uni Soviet), keenam ciri itu adalah.

(1) tingkat pertumbuhan keluaran perkapita yang tinggi dan laju pertumbuhan penduduk, (2) tingkat kenaikan yang tinggi pada total produktivitas faktor, terutama produktivitas tenaga kerja (3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, (5) kecenderungan negara-negara yang secara ekonomis maju untuk menggapai bagian dunia yang lain dalam usaha memperluas pasar dan memperoleh sumber bahan mentah, (6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya meliputi sepertiga bagian penduduk dunia.

Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets

- (1) Tingkat keluaran perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Semua negara yang dewasa ini tergolong maju memiliki pengalaman dalam usaha melipat gandakan tingkat keluaran negara selama sejarah pertumbuhan ekonomi modern, yaitu sejak tahun 1770 hingga sekarang.
- (2) Tingkat kenaikan produktivitas yang tinggi. Ciri kedua dari pertumbuhan ekonomi modern secara keseluruhan adalah laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang besar. Negara-negara maju mengalami angka

kenaikan produktivitas juga telah berlipat ganda jika dibandingkan dengan masa sebelum modernisasi.

- (3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan negara - negara yang kini dibilang maju mengungkapkan karakteristik penting ketiga, yaitu tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi itu. Beberapa komponen utama dari perubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari pertanian ke bukan-pertanian dan yang berlangsung akhir-akhir ini. Begitu juga dari sektor industri dan ke sektor jasa suatu perubahan atau pergeseran yang cukup mencolok terjadi dalam skala atau rata-rata ukuran unit-unit produksi, dari usaha keluarga yang relatif kecil atau perorangan ke perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional yang dikelola secara besar-besaran dan bersifat impersonal. Akhirnya, telah terjadi pula pergeseran yang menyangkut status letak atau lokasi dan tempat tinggal angkatan kerja dari wilayah-wilayah pedesaan yang sebelumnya melakukan kegiatan-kegiatan di sektor pertanian dan bukan-pertanian yang masih terkait, ke pencapaian hasil

produksi melalui kegiatan-kegiatan di sektor manufaktur dan jasa yang berorientasi kota dan sekitarnya.

(4) Tingkat transformasi sosial, politik dan ideologi. Karena suatu perubahan struktural ekonomi yang penting terjadi di masyarakat mana pun, maka pada waktu yang bersamaan sering kali diperlukan pula transformasi dalam hal sikap, kelembagaan dan ideologi tertentu. Suatu contoh yang cukup jelas sehubungan dengan transformasi sosial ini misalnya adalah urbanisasi secara besar-besaran dan penerapan gagasan-gagasan, sikap-sikap dan lembaga-lembaga yang sering kali dikenal dengan sebutan modernisasi. Myrdal (salah satu tokoh ekonomi modern) telah membuat suatu daftar panjang mengemukakan gagasan-gagasan modernisasi sebagai berikut

(a) Rasionalitas, merupakan pengganti metode-metode modern untuk berpikir, bertindak, memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi bagi orang-orang dahulu dan yang berpikir rasionalitas. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan teknik-teknik baru, baik di sektor pertanian, di pabrik-pabrik ataupun di bidang transportasi.

- (b) Perencanaan kebijakan yang terkoordinasi secara rasional yang akan dapat menghasilkan tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- (c) Persamaan sosial dan ekonomi, yaitu usaha untuk memperoleh lebih besar persamaan dalam hal status, kesempatan, kemakmuran, pendapatan dan taraf kehidupan.
- (d) Lembaga-lembaga dan sikap-sikap yang lebih baik. Perubahan-perubahan diperlukan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan ketekunan tenaga kerja yaitu mendorong kompetisi secara efektif, meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi dan perkembangan masing-masing perusahaan, memungkinkan persamaan dalam memperoleh kesempatan, meningkatkan taraf kehidupan dan mendorong terwujudnya pembangunan. Termasuk di antara lembaga-lembaga sosial yang memerlukan perubahan adalah sistem pemilikan dan pengolahan lahan pertanian model lama, struktur pendidikan dan keagamaan, sistem administrasi dan perencanaan dan sebagainya.

- (e) Jangkauan ekonomi internasional. Kecenderungan negara-negara maju untuk menjangkau bagian dunia yang lain adalah untuk mendapatkan bahan baku dan bahan mentah untuk produksi, mendapatkan tenaga kerja murah dan pasar yang melimpah, untuk melemparkan produk-produk manufaktur. Beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk menjangkau bagian dunia lain tersebut secara ekonomis dimungkinkan melalui kekuatan teknologi modern yang terus-menerus mereka tingkatkan, khususnya dalam bidang transportasi dan komunikasi.
- (f) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi internasional. Walaupun telah terjadi kenaikan yang luar biasa dalam tingkat keluaran dunia selama lebih dari dua abad terakhir, namun penyebaran pertumbuhan ekonomi modern umumnya masih terbatas jangkauannya, yaitu kurang dari seperempat penduduk dunia. Minoritas penduduk dunia ini malah menikmati lebih dari 80 persen pendapatan dunia.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun (Sukirno, 2010 : 10). Bisa juga dikatakan PDRB merupakan nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dan merupakan indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan (Daryanto, 1994 : 20) Sehingga PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan.

Pada hakekatnya PDRB menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah baik yang dilakukan masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu, yang meliputi seluruh hasil produksi yang diciptakan oleh daerah. PDRB merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB secara tidak langsung juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam yang dimilikinya.

Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah data

Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Tarigan (2004 : 98), PDRB dapat dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga-harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga tahun dasar.

Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ketahun bisa dilihat dari besarnya PDRB, baik berdasar harga konstan maupun harga berlaku yang diujudkan dalam suatu kegiatan pembangunan. Adanya kegiatan pembangunan sekaligus merupakan kegiatan ekonomi suatu daerah akan membawa harapan baru bagi penduduknya seperti penyerapan tenaga kerja. Pada dasarnya PDRB sama dengan PDB, perbedaannya hanya pada ruang lingkupnya saja, yaitu PDB berlaku secara nasional sedangkan PDRB berlaku untuk daerah-daerah dinegara tersebut. Sedangkan PDRB yang ada didaerah dijumlahkan menjadi PDB secara nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka kesejahteraan penduduknya dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan PDRB. PDRB secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan (Daryono, 1994 : 19).

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah secara riil karena sudah dikurangi tingkat inflasi. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan ukuran harga yang berlaku setiap tahun yang berbeda.

4. Distribusi Pendapatan Nasional

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi, terutama yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang adalah adanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang lebih merata dikatakan lebih baik daripada distribusi pendapatan yang kurang merata hanyalah atas dasar pertimbangan perikemanusiaan saja. Pendistribusian kembali pendapatan (redistribusi pendapatan) yang berarti mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikannya kepada kelompok miskin adalah sangat baik di pandang dari segi etika. Pendistribusian kembali diserahkan pada orang-orang kaya atau kelompok orang-orang kaya.

Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah tergantung ketimpangan distribusi pendapatan yang bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu. Distribusi pendapatan sangat penting dalam pembangunan karena berdampak terhadap kohesi masyarakat, berpengaruh terhadap tingkat

kemiskinan untuk setiap rata-rata pendapatan per kapita dan bahkan mempengaruhi kesehatan rakyat miskin.

Distribusi pendapatan dapat berupa pemerataan maupun ketimpangan yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Ismoro, 1995 : 13). Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek yaitu, (1) bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan yang bisa dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan, (2) pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga.

Pengukuran masalah pemerataan sudah sejak lama menjadi perdebatan dikalangan ilmuwan, namun pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah *koefisien Gini* yang dibantu dengan *kurva Lorenz*. Ukuran yang digunakan untuk menentukan ketidakmerataan baik ditingkat wilayah maupun rumah tangga dan tingkat kemiskinan.

Persoalan menjadi sangat kompleks di negara miskin yaitu antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan dimana keduanya sama –sama penting tapi sangat sulit di wujudkan secara bersamaan. Kuznets menyatakan bahwa distribusi pendapatan

memburuk sebagai efek kenaikan pendapatan yang sama sekali tidak kuat sehingga tingkat pertumbuhan pendapatan tidak secara sistimatis linear dengan perubahan dalam distribusi pendapatan. Keyakinan mengenai adanya efek menetes ke bawah (*Trickle Down Effects*) dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang meyakini bahwa strategi pembangunan yang dilakukan dapat lebih fokus pada bagaimana mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat, tidak terbukti secara signifikan.

a. Beberapa hal yang berkaitan dengan distribusi pendapatan.

Beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan (*income redistribution*) sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Menurut Adam Smith (beberapa hal mengenai distribusi pendapatan.

1) Perlu campur tangan Pemerintah dalam bidang keadilan karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan, maka sebaiknya pendistribusian kembali pendapatan itu ditangani oleh pemerintah. Hal ini karena manusia secara perorangan kurang tertarik untuk mengusahakan keadilan ini dan seringkali tidak mampu untuk merealisasikan usaha tersebut berhubung penduduk hanya

merupakan bagian yang kecil saja dari masyarakat.

- 2) Terdapat unsur barang publik (*public goods*), hal ini bukan redistribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkannya mempunyai ciri sebagai barang publik. Seperti telah dikemukakan bahwa barang publik atau barang kolektif ini mempunyai sifat "*non rivalry consumption*" dan "*on exclusion*". Artinya barang publik ini bila dikonsumsi oleh seseorang tidak akan mengurangi tersediannya barang tadi bagi konsumsi orang lain, serta pula bagi mereka yang tidak sanggup membayarnya tidak mungkin dapat dikeluarkan dari konsumsi barang tersebut. Semakin sehatnya golongan miskin serta berkurangnya kriminalitas, berarti kesejahteraan golongan kaya meningkat juga.
- 3) Kekuatan politik. Seringkali golongan kaya walaupun jumlahnya tidak banyak namun dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Sehingga untuk menghindari adanya kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusikan kembali pendapatan sehingga terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah tidak akan dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok pendapatan tinggi.

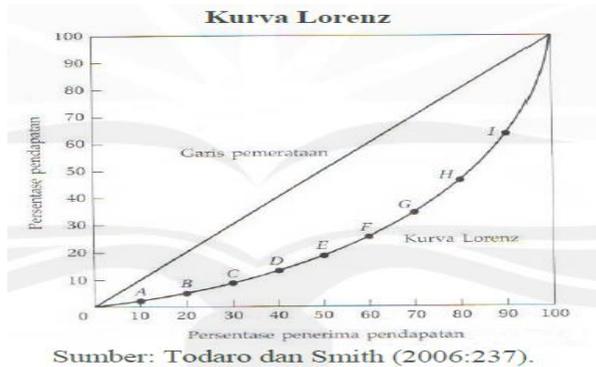
Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan

suatu daerah atau negara baik yang diterima masing masing orang ataupun dari kepemilikan faktor faktor produksi di kalangan penduduknya (Dumayri, 1999 : 82). Distribusi pendapatan yang diterima oleh individu- individu dalam masyarakat tidak melihat bagaimana cara yang dilakukan oleh individu/rumah tangga untuk memperoleh pendapatannya, banyaknya anggota rumah tangga yang mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggany atau apakah penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, royalti, keuntungan maupun warisan, lokasi dan lain-lain. Distribusi regional, selain dapat ditinjau berdasarkan distribusi perorangan dan fungsional, dapat pula ditinjau berdasarkan distribusi regional /daerah misalnya untuk kasus di Indonesia, distribusi pendapatan antar kabupaten antar provinsi, antar jawa, luar jawa, antar desa-kota.

b. Indikator Distribusi Pendapatan.

- 1) Kurva Lorenz adalah kurva yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan relatif, dengan cara menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana kurva lorenz itu berada, yang dikenal dengan nama indeks gini. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase

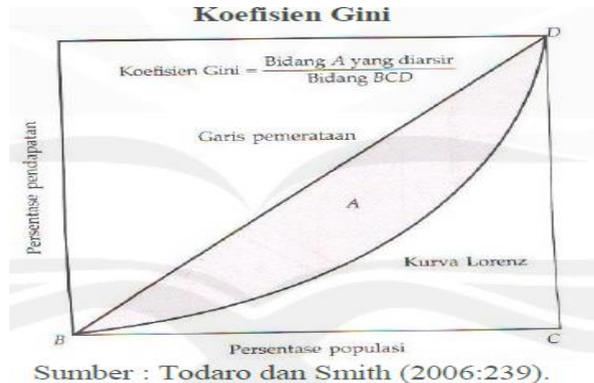
pendapatan yang mereka terima misalnya selama satu tahun. Derajat pemerataan/ketidak merataan menurut kurva Lorenz merupakan ukuran ketidak merataan



Gambar Kurva Lorenz

- 2) Koefisien Gini merupakan ukuran singkat mengenai ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara biasanya diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan luas total dari bujur sangkar dalam kurva Lorenz tersebut. Koefisien Gini ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir dengan luas segi tiga BCD (dalam gambar 2).

Gambar 2 : Koefisien Gini



- 3) Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan. Artinya dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti oleh meningkatnya kesenjangan pendapatan. Tapi dalam jangka panjang, hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti oleh penurunan kesenjangan pendapatan. Fenomena ini disebut dengan "Kurva U terbalik dari Hipotesis Kuznets" (Skuosen, 2005 : 58).

Menurut Kuznets, pada tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil, dan akhirnya menurun pola perkembangan ini menurut

Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat, yang disebabkan oleh adanya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal.

Hipotesis U terbalik tentang ketimpangan : Teori Kuznets

Banyak perhatian yang telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam masa pembangunan. Simon Kuznets (1995) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata (Kuncoro :1997 : 79).

Berdasarkan hipotesis tersebut, muncul pertanyaan : kenapa terjadi suatu *trade-off* antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk beberapa lama atau berdasarkan kerangka pemikiran yang melandasi “ hipotesis Kuznetz”. Apakah memang terbukti ada suatu korelasi positif jangka panjang setelah beberapa tahun antara tingkat pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan dan tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan. Evolusi kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa

yang disebut Hipotesa Kuznetz. Dengan memakai data antar negara (*cross-section*) dan data dari sejumlah survey di setiap negara (*time series*), Simon Kuznetz menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan atau ekonomi industri. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi sedangkan pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Ada dua pendapat dari hasil studi empiris yang menguji hipotesis Kuznetz, dengan menggunakan data makro dari sejumlah negara yaitu pertama, sebagian besar studi-studi itu mendukung hipotesis kuznetz, sedangkan sebagian lainnya menolak, misalnya, Bruno dkk (1995), Deininger dan Squire (1996 : 565) dan Barro (1995 : 145) tidak menunjukkan adanya suatu relasi yang sistematis antara pertumbuhan pendapatan

dan pola distribusinya. Juga studi dari Papanek (1978 :) yang mencakup 61 negara menunjukkan relasi antara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan (yang dilihat dari tingkat pendapatan) tidak signifikan. Walaupun hipotesis itu diterima, namun sebagian besar dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok negara-negara industri maju.

Hasil studi tersebut di atas harus ditanggapi dengan kritis karena pendekatan cross-section study mempunyai sejumlah kelemahan, di antaranya adalah pendekatan tersebut tidak memasukkan pengaruh-perengaruh terhadap perkembangan distribusi pendapatan di masing-masing negara secara individu.

2. Kriteria Bank Dunia

Menurut Suseno (1990 : 87) pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia didasarkan pada porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga (3) kelompok, yaitu: (1) kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah (penduduk termiskin); (2) kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah; (3) kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya).

Bank Dunia mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besarnya persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Indikator ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia adalah.

- (1) kelompok 40 persen penduduk termiskin pengeluarannya kurang dari 12 persen dari keseluruhan pengeluaran, maka dikategorikan tingkat ketimpangan yang tinggi.
- (2) kelompok 40 persen penduduk menengah pengeluarannya antara 12 sampai 17 persen dari seluruh pengeluaran, dikategorikan tingkat ketimpangan sedang
- (3) kelompok 20 persen penduduk terkaya pengeluarannya lebih dari 17 persen dari seluruh pengeluaran, dikategorikan tingkat ketimpangan rendah

Kemerataan distribusi pendapatan nasional bukan semata mata pendamping pertumbuhan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan . Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidak merataan distribusi

pendapatan dan harta kekayaan atau aset tapi hal tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari masalah ketidak merataan yang lebih luas di Negara Sedang Berkembang, misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kenbebasan utk memilih dan lain lain.

Pemahaman yang lebih mendalam akan masalah ketidakmerataan dari kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, perdagangan internasional dan sebagainya. Sebuah cara yang sederhana untuk mendeteksi masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi dalam dua macam barang yaitu barang-barang pokok (*necessary goods*) seperti makanan pokok pakaian, perumahan sederhana, dan barang-barang mewah seperti mobil mewah, video, televisi, pakaian mewah dan sebagainya.

Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB, Adelan dan Morris (Arsyad, 2004 : 226) mengemukakan delapan (8) sebab yaitu : (1) penambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan

perkapita; (2) inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang; (3).ketidakmerataan pembangunan daerah; (4) investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (5) rendahnya mobilitas social, (6) pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (7) memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor NSB, (8) hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut dengan kata lain faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997 : 111).

Distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhinya. Adam smith dan Marx

berpendapat bahwa persoalan pokok dari distribusi pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi diantaranya upah, sewa dan laba (Bigsten, 1987 : 60).

3. Kriteria Kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemiskinan yang melanda dunia ini juga dirasakan oleh negara Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga Pemerintah melalui BPS membuat kriteria kemiskinan, supaya bisa diketahui dengan jelas pengertian kemiskinan dan bisa dengan pasti bisa di ketahui jumlah penduduk miskin dan cara menanggulanginya. Pengertian kemiskinan anantara satu negara dengan negara lain berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia di buat oleh BPS yang mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran per orang, per hari sebagai acuan .

Kriteria BPS

- 1) Tidak miskin, adalah orang yang pengeluaran per bulan lebih dari 350.610 rupiah
- 2) Hampir tidak miskin, adalah orang yang pengeluaran per bulan, per kepala antara 280.488 rupiah sampai 350.610 rupiah, atau 9.350 rupiah sampai 11.687 rupiah per orang, per hari.
- 3) Hampir miskin, adalah orang yang pengeluaran per bulan, per kepala 233.740 rupiah sampai 280.488rupiah atau sekitar 7.780 rupiah sampai 9.350 per orang per hari

- 4) Miskin, adalah orang yang pengeluaran per bulan per kepala sebesar 233.740 ke bawah atau sekitar 7.780 rupiah ke bawah per orang per hari
- 5) Sangat miskin, tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sehingga APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dapat dirasakan oleh masyarakat (Bana, 2001: 12). APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana sehingga pada saat tertentu manfaatnya bis dirasakan oleh masyarakat (Bana, 2001: 12).

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada

hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dari itu DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik.

Mardiasmo (1999: 11) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua

aktivitas pada berbagai unit kerja.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dikatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas: Pendapatan asli daerah, yaitu (a) hasil pajak daerah;(b) hasil retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah : dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dikatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dikatakan bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Di dalam

penjelasan pasalnya bahwa daerah tidak boleh mengganggu pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjelaskan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Berkenaan dengan tujuan pengelolaan APBD oleh Devas, dkk. (1989 : 279) meliputi: (1) tanggung jawab; (2) memenuhi kewajiban keuangan; (3) kejujuran; (4) hasil guna dan daya guna; dan (5) pengendalian.

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut: (1) merupakan informasi atau pernyataan; (2) Mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan; (3) dari suatu organisasi atau badan usaha; (4) untuk suatu jangka waktu tertentu (umumnya 1 tahun); (5) perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara, dan (6) diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu

b. Belanja Daerah dalam APBD

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah semua

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah menurut kelompok dibedakan menjadi dua yaitu : (1) belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; (2) belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah terdiri dari (1) belanja operasional yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, (2) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode; (3) belanja tidak terduga yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang; (4) transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Belanja Daerah ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu: (1) kelompok belanja langsung yang terdiri dari: (a) belanja

pegawai; (b) belanja bunga; (c) belanja subsidi; (d) belanja hibah; (e) belanja bantuan sosial; (f) belanja bagi hasil; (g) bantuan keuangan; (h) belanja tidak terduga. (2). Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari (a) belanja pegawai; (b) belanja barang dan jasa; (c) belanja modal.

c. Fungsi Anggaran

Dari pengertian anggaran diatas maka dapat diketahui beberapa fungsi anggaran yaitu: (1) instrumen politik : anggaran adalah salah satu instrumen formal yang mewujudkan bargaining eksekutif dengan tuntutan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislatif, (2) instrumen kebijakan fiskal. Dengan mengubah prioritas sebesar alokasi dana, anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya, (3) instrumen perencanaan : dalam anggaran disebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya, dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja, (4) anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja, ini dimaksudkan agar unit kerja tidak melakukan *overspending*, *underspending*

atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

Fungsi utama penyusunan anggaran : (1) Menentukan penerimaan dan pengeluaran, (2) Membantu dalam membuat kebijakan dan perencanaan, (3) Mengesahkan pengeluaran yang akan datang, (4) Menjadikan dasar pengendalian pendapatan dan pengeluaran, (5) Sebagai standar dalam evaluasi kerja, (6) Sebagai motivasi manajer dan karyawan, dan (7) Mengkoordinir kegiatan dari berbagai macam tujuan.

d. Norma dan Prinsip Anggaran

- 1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (*good governance*).
- 2) Disiplin anggaran. Struktur anggaran yang harus disusun dan kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Keadilan anggaran. Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan

retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

5) Format anggaran. Pada dasarnya anggaran disusun berdasarkan anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus dapat membentuk dana cadangan, sedangkan apabila defisit dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Manajemen Belanja

Proses pelayanan publik merupakan tujuan utama dari organisasi pemerintahan.

Hal inilah yang membedakan dengan organisasi bisnis/ perusahaan. Dalam hal ini, laba bukan merupakan tujuan utama pemerintah, melainkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proses pencapaian laba yang tinggi pada organisasi bisnis dengan meningkatkan pendapatan dan menekan belanja/biaya tidak serta merta bisa diadopsi di pemerintahan, terutama pemerintah daerah.

Bahkan, belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam menstimulus perekonomian daerah, tidak seperti di perusahaan, dimana manajemen dituntut untuk menekan belanja/biaya serendah mungkin, di pemerintah daerah, kepala daerah justru diminta untuk membelanjakan dana yang mereka kelola sebaik mungkin sebab sebagian belanja tersebut juga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sehingga manajemen belanja sangat penting dilakukan agar dana yang mereka belanjakan sejalan dengan semangat, efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

1) Prinsip-Prinsip Manajemen Belanja

- a) Perencanaan belanja. Proses penyusunan APBD, khususnya belanja, sebaiknya melalui proses perencanaan yang matang. Belanja yang tercermin dalam APBD sebaiknya sesuai dengan

kebutuhan pemerintahan untuk pelayanan publik. Analisis Standar Belanja (ASB) sangat perlu dilakukan agar belanja yang direncanakan tidak melampaui kewajaran.

- b) Pengendalian belanja. Untuk memastikan belanja daerah tepat sasaran dan tidak menyimpang, maka perlu dilakukan proses pengendalian terhadap belanja. Semua bukti transaksi serta dokumen pendukung harus tersedia guna memudahkan pelacakan bila sewaktu - waktu diduga terjadi penyalahgunaan.
- c) Akuntabilitas belanja adalah kegiatan yang berhubungan dengan dana publik, oleh karenanya perlu bagi pemerintah daerah selaku pelaksana serta anggota DPRD untuk memastikan bahwa proses penyusunan belanja hingga realisasinya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik atau masyarakat.
- d) Auditabilitas belanja. Untuk memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut, maka APBD terkhusus belanja daerah harus dapat diaudit oleh lembaga audit eksternal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 yang merupakan penjelasan mengenai penyusunan APBD membawa perubahan besar dari sebelumnya yang diatur oleh Kempemdagri No. 29 Tahun 2002. Ritonga (2009) merinci beberapa perubahan tersebut antara lain: (1) diperkenalkannya bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. (2) belanja aparatur dan belanja publik dihilangkan dan lebih menekan kepada belanja langsung dan belanja tidak langsung. (3) penyusunan indikator kinerja mulai dari input, output, dan hasil, tetapi manfaat dan dampak dihilangkan. (4) Selanjutnya, mulai diperkenalkannya *Multi Term Expenditure Frameworks* (MTEF).

Lebih lanjut, Permendagri No. 13/2006 direvisi kembali oleh Permendagri No. 59/2007. Dalam revisi tersebut, beberapa hal dihapus, diubah, dan ditambah. Berikut ini beberapa rincian objek pendapatan/belanja/ pembiayaan yang diubah/ditambahkan dalam Permendagri No. 59/2007 (Ritonga, 2009 : 78), (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan termasuk lain-lain PAD yang sah. (2) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk dalam lain-lain PAD yang sah. (3) hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. (4) hibah yang diberikan tidak terus-menerus diperuntukkan bagi dukungan kegiatan di luar aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (5) belanja hibah diberikan secara selektif sesuai kemampuan keuangan daerah. (6) belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, perorangan, dan partai politik. (7) bantuan kepada partai politik dianggarkan dalam bantuan sosial dengan ketentuan perundang-undangan. (8) belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, dan pemanfaatan jasa dari pihak ketiga dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. (9) belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan. (10) investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (11) investasi ional jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.

5. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelian barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk tingkat nasional dan APBD untuk tingkat daerah atau regional (Sukirno, 2000 : 62). Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002 : 97)

Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan sering juga dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian sehingga bila terjadi resesi, pemerintah melalui kebijakan yang dimiliki dapat menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah

dimana semakin besar kegiatan pemerintah maka pengeluaran pemerintah juga semakin besar.

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada : (1) pajak yang diharapkan akan diterima; (2) pertimbangan politik; (3) permasalahan yang dihadapi (Samuelson dan Nordhaus, 2001 : 128).

a. Beberapa teori Pengeluaran Negara

Teori teori yang mendasari pengeluaran Negara (Mankusubroto, dikemukakan oleh 1) Musgrave dan Rostow, 2) Wagner, 3) Peacock dan Wiseman. Teori pertama yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow menyatakan bahwa perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Musgrave dan Rostow membagi proses pembangunan menjadi tiga (3) yaitu: (1) Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang lebih besar untuk innvestasi pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan lain. Tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah sudah berkurang

karena diharapkan investasi swasta sudah mulai masuk. (3) Tahap lanjut, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, tetapi tujuannya lebih kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lain-lain.

Teori kedua yang dikemukakan oleh Wagner, yang didasarkan pada pengamatan dinegara-negara maju, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan pendapatan perkapita negara. Pada negara-negara maju, sering terjadi kegagalan pasar yang menimpa industri-industri tertentu dan bisa merembet ke industri lain yang terkait. Maka disini diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, dan pendidikan.

Teori yang ketiga dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, dikatakan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal ini berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Apabila pemerintah menaikkan pajak diatas batas toleransi masyarakat, maka masyarakat cenderung untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak. Karena hal itulah maka pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak, karena peningkatan pungutan pajak akan akan mengakibatkan investasi swasta berkurang. Tetapi meskipun pemerintah

tidak menaikkan pajak, dalam kondisi normal dengan berkembangnya perekonomian, maka penerimaan negara akan semakin berkembang, dan pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

b. Macam-macam pengeluaran Negara.

Pengeluaran negara dibedakan menjadi (1) pengeluaran pemerintah pusat, (2) pengeluaran Pemerintah Provinsi, (3) pengeluaran Pemerintah Kabupaten/kota. Pengeluaran Pemerintah Pusat terdiri dari (a) pengeluaran untuk belanja berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain, (b) dana yang dialokasikan ke daerah yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta (c) pengeluaran untuk pembiayaan yang terdiri dari pengeluaran untuk obligasi Pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembiayaan lain-lain.

Pengeluaran Pemerintah yang kedua adalah pengeluaran oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari (a) pengeluaran untuk belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja operasi lainnya. (b) belanja modal yang digunakan untuk belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, belanja tak

tersangka, dan (c) bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa yang terdiri dari bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, pengeluaran untuk pembiayaan yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan belanja pinjaman jangka panjang.

Pengeluaran Pemerintah yang ketiga adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari (a) pengeluaran untuk belanja, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. (b) belanja modal yang terdiri dari belanja aset tetap, dan belanja aset lain-lain. (c) bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan yang terdiri atas bagi hasil pajak ke desa/kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa/kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa/kelurahan, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah Otonom lainnya.

Pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan. Pengeluaran pemerintah baik

dalam bentuk pengeluaran rutin (pembelanjaan untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji pegawai) dan pengeluaran pembangunan (untuk membiayai pengeluaran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi (Sukirno, 2011 : 61). Pengeluaran (pembelanjaan) pemerintah adalah pembelanjaan pemerintah yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal, barang konsumsi, dan keatas jasa-jasa (Sukirno, 2011 : 61).

Fungsi Pemerintah dalam ekonomi ada tiga (Mangkusubroto, 1997 34) yaitu: (1) fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi (barang publik, barang swasta dan barang campuran) dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa dimana pihak swasta tidak dapat memproduksinya; (2) fungsi distribusi, adalah fungsi pemerintah untuk mewujudkan distribusi pendapatan atau kekayaan yang merata melalui kebijakan fiskal yaitu berupa pengenaan beban pajak kepada masyarakat yang mampu dan dan memberikan subsidi pada masyarakat yang kurang mampu;. (3) fungsi stabilitas adalah fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan

kondisi perekonomian karena perekonomian yang diserahkan kepada pasar akan rentan terhadap guncangan inflasi.

Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan tujuannya (Suparmoko, 1994 : 57) yaitu, (1) exhaustive, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk mengalihkan sektor-sektor produksi dan sektor swastake sektor pemerintah (berupa pembelian barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi untuk menghasilkan barang lain), (2) transfer payment, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk memindahkan daya beli dari unit ekonomi yang satu ke unit ekonomi yang lain dan menyerahkan keputusan penggunaan daya beli pada unit terakhir (bisa berupa pemindahan daya beli pada individu untuk kepentingan sosial, pada perusahaan sebagai subsidi maupun pada pemerintah sebagai hibah/grant)

Pemerintah bisa mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya yang terkait dengan fungsi desentralisasi. Pemerintah bisa mempunyai kebijakan penuh menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali DAK/Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk kebutuhan khusus) yang dituangkan kedalam APBD yang memuat rancangan keuangan yang diperoleh dan dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan

kewenangannya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum selama satu tahun anggaran.

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian.

a. Konsep-Konsep dasar kebijakan fiskal

- 1) Kebijakan fiskal merupakan perubahan pada belanja atau penerimaan pajak stabilitas harga dan laju pertumbuhan ekonomi
- 2) Kebijakan fiskal ekspansif adalah peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dengan tujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
- 3) Kebijakan kontraktif adalah pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat, tujuannya untuk mengontrol tingkat inflasi.
- 4) Efek pengganda dalam ekonomi yaitu peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan maupun pemerintah yang akan merupakan pendapatan bagi pihak lain.
- 5) Kebijakan fiskal sisi-penawaran adalah kebijakan fiskal selain bisa mempengaruhi

permintaan juga bisa mempengaruhi penawaran agregat.

Tujuan kebijakan fiskal adalah (1) Meningkatkan kesempatan kerja. Tersedianya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat yang berarti berkurangnya jumlah pengangguran, (2) Meningkatkan laju investasi, yang berasal dari swasta maupun pemerintah dimana bila pemerintah menurunkan pajak maka akan memacu perusahaan memperbanyak melakukan investasi, (3) Meningkatkan stabilitas ekonomi. Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi adalah adanya stabilitas ekonomi

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berpengaruh terhadap pengeluaran dan penerimaan. Tetapi dengan disadarinya pengaruh-pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah, timbullah gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dimaksud dengan kebijakan fiskal (Suparmoko, 1991 : 225).

Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu perpajakan dan pengeluaran pemerintah

(Mankiw, 2003 : 89). Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi (Surjaningsih et al, 2012).

Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya dalam masa depresi, dimana penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula yang justru berakibat pada semakin rendahnya pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian. Kalau timbul deflasi atau inflasi, kebijakan yang dipercayai untuk menanggulangnya adalah kebijakan moneter lewat Bank Sentral dan bukan kebijakan fiskal.

Saat depresi pada tahun 1930-an itulah teori kebijakan fiskal pertama kali muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Kebijakan moneter biasanya berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Pada saat terjadi pengangguran dan harga-harga turun., maka cara yang ditempuh oleh kebijakan moneter dapat dengan menurunkan tingkat bunga, atau menurunkan deking (reserve requirement) atau dengan politik pasar terbuka, dimana pemerintah membeli surat berharga.

Namun karena harga cenderung turun, maka para investor tidak berani mengadakan investasi, sehingga penerimaan agregat tidak dapat meningkat dan depresi tidak terobati. Oleh karena itu bukan swasta melainkan pemerintah yang harus berani mengambil bagian dengan menciptakan proyek-proyek yang membutuhkan pengeluaran pemerintah. Keynes menerbitkan bukunya yang terkenal dengan “ The General Theory of Employment Interest and Money “ (Teori Umum tentang kesempatan kerja, bunga dan uang) yang merupakan dasar dari perkembangan teori tentang kebijakan fiskal dan sejak itulah maka peranan pemerintah dalam perekonomian semakin menonjol.

Menurut Keynes, dalam perekonomian yang mengalami krisis dan depresi, kebijakan moneter melalui penurunan tingkat suku bunga tidak efektif. Permintaan agregat dapat dinaikkan dengan cepat hanya melalui kebijakan fiskal (Romer, 2001: 34). Menurut Keynes, pemerintah mempunyai peranan penting untuk mengatur permintaan agregat dalam rangka menjaga perekonomian agar selalu mendekati tingkat kesempatan kerja penuh.

- b. Teori Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal pertama kali dikemukakan oleh Keynes dalam karya besarnya, “ Teori Umum Hubungan Kerja, Bunga dan Utang” di pengaruhi teori-teori

baru tentang bagaimana perekonomian bekerja dan masih dipelajari sampai hari ini. Keynes mengembangkan sebagian besar teori – teorinya selama depresi besar dan teori *keynesian* telah digunakan dan disalahgunakan dari waktu ke waktu, karena teori ini memang populer dan secara khusus diterapkan untuk mengurangi kemerosotan ekonomi. Singkatnya, teori-teori ekonomi keynesian didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah harus menggunakan kekuatan guna meningkatkan belanja dan menciptakan kondisi yang mudah didapatkan, dimana akan merangsang perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran pada akhirnya meningkat. Gerakan teori keynesian menunjukkan bahwa kebijakan moneter sendiri memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan krisis keuangan, sehingga menciptakan perdebatan keynesian versus monetarisme, sementara kebijakan fiskal telah berhasil digunakan selama dan setelah depresi besar, teori keynesian mulai dipertanyakan pada tahun 1980 setelah popularitas jangka panjang. Monetaris, seperti Milton Friedman dan pihak lain mengklaim bahwa tindakan pemerintah yang sedang berlangsung tidak membantu negara itu menghindari siklus tak berujung ekspansi produk domestik bruto

(PDB) dibawah rata-rata, resesi dan berkuatnya tingkat suku bunga.

Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap output dari pada kebijakan moneter. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa, pertama elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga kecil sekali

Kebijakan fiskal yang ekspansif akan menggeser kurva IS kekanan sehingga output meningkat. Sedangkan ekspansi moneter dengan dasar pemikiran dalam kebijakan fiskal adalah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian, karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan lebih menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian karena menurunnya pendapatan masyarakat sebagai obyek pajak dan selanjutnya justru memperkecil penerimaan pemerintah lagi. Di samping itu juga disadari bahwa dalam masa depresi banyak dana masyarakat yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran

pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga.

Macam-macam kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam atas dasar : (1) pembiayaan fungsional; (2) pengelolaan anggaran; (3) stabilisasi anggaran otomatis; (4) anggaran belanja seimbang (Suparmoko, 1996 : 130).

Pengeluaran pemerintah termasuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang di Indonesia dikenal dengan APBN (Nizar, 2009 : 102). Tujuan kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan tingkat output maupun kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Subroto, 2008 : 150). Pengeluaran Pemerintah harus dilakukan untuk membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan makin tingginya keterkaitan dengan aspek kehidupan lainnya, rasanya tidak mungkin menolak peran pemerintah dalam semua sistim ekonomi termasuk perekonomian liberal sekalipun. Semenjak Indonesia merdeka sudah terlihat bahwa pemerintah memegang peran besar dalam perekonomian dan ini tercantum dalam pasal

33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yaitu, (1) ayat 2: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (2) ayat 3: sumber air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Adapun fungsi pemerintah menurut Mngkusubroto ada tiga (3) yaitu, (1) fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan ekonomi. (2) fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa seperti pembangunan. (3) fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

6. Anggaran Kinerja dan Analisis Standar Belanja

Dalam perhitungan ASB, anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tak langsung :

a) Belanja Langsung

Belanja langsung (yang dahulu di sebut belanja pembangunan) adalah belanja pemerintah yang berkaitan langsung dengan program program pemerintah, misalnya, pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk bantuan terhadap masyrakt miskin, tata kota, pembangunan untuk perumahan

penduduk miskin, pembangunan infra struktur dll. Belanja langsung adalah belanja yang di pengaruhi oleh adanya program atau kegiatan yang di rencanakan . jenis belanja langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa, dan belanja perjalanan dinas. Karakteristik belanja langsung adalah input / alokasi belanja yang di tetapkan dapat di ukur dan diperbandingkan dengan output yang di hasilkan (Halim, 2002 : 31).

Belanja Langsung adalah belanja Pemerintah yang berkaitan langsung dengan program-program pemerintah, misalnya pengeluaran Pemerintah yang digunakan untuk bantuan terhadap masyarakat miskin, tata kota, pembangunan untuk perumahan penduduk miskin, pembangunan infra struktur, dan lain-lain.

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Rahmawati, 2010 : 87). Menurut PP No. 24 Sistim Akuntansi Pemerintah, belanja langsung diartikan sebagai belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan, yang bukan merupakan koskuensi

ada atau tidak adanya suatu program atau kegiatan.

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 telah direvisi dua kali yaitu disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan yang tyerbaru ada;ah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dari beberapa pengertian tersebut bisa ditarik pengertian mengenai belanja daerah yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengertian belanja daerah menurut Halim (2002 : 15) Belanja daerah mencerminkan aktivitas daerah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun anggaran berjalan. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang, memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat (Suparmoko, 2000 : 57).

Belanja daerah merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal

yang dilakukan pemerintah, disamping juga merupakan pendapatan pemerintah daerah. Makin besar belanja daerah diharapkan kegiatan perekonomian daerah juga akan meningkat (terjadi ekspansi perekonomian) dan sebaliknya semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah yang akan berakibat menurunnya kegiatan ekonomi (terjadi kontraksi perekonomian).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 dikatakan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Seperti halnya belanja pegawai dalam kelompok Belanja Langsung dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi

pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup barang pakai habis, material jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah, gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan, minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, dan pakaian hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dari

aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

b) Belanja tidak langsung

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 juga menyatakan bahwa struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja Pemerintah yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai negeri. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa dan belanja pemeliharaan. Belanja Tidak Langsung digunakan secara periodik (umumnya

bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat umum

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Rahmawati, 2010 : 8). Secara sederhana belanja tidak langsung biasanya dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi sebagai respon atas barang dan jasa.

7. Hubungan Belanja Lngsung dan Belanja Tidak Langsung dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Belanja Daerah (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya belanja pemerintah maka masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dan menjalankan usahanya dengan baik seperti adanya infrastruktur yang baik maka roda perekonomian akan menjadi lancar dan produksi meningkat. Meningkatnya produksi berarti tumbuhnya perekonomian dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan rata-rata namun ini seringkali diiringi ketidak merataan distribusi pendapatan antar penduduknya karena dalam pertumbuhan ekonomi ada pihak-pihak yang tidak bisa menikmati pertumbuhan ini seperti orang-orang yang kurang berpendidikan yang tidak bisa masuk dunia kerja dan karena ketidak sesuaian antara kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang ditawarkan. Tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja.

Beberapa cara pemerataan distribusi pendapatan, antara lain : {1) kebijakan fiskal, dengan jalan menerapkan sistim perpajakan yang bersifat progresif, melakukan pembelanjaan yang bersifat membantu golongan masyarakat miskin berupa subsidi, memberikan bantuan yang bersifat mendorong kearah meningkatnya kualitas manusia, seperti beasiswa dan pembangunan sekolah-sekolah, (2) transfer uang tunai, dengan cara memberikan subsidi berupa uang tunai kepada orang yang termasuk berpenghasilan rendah, (3) transfer barang, dengan maksud meminimalisir penyimpangan maksud pemberian subsidi yang sesungguhnya, (4) program kesempatan kerja (yaitu pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu).

Berbagai macam program pendistribusian pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah uni harus bisa mencapai sasaran sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat ini adalah adanya pendataan yang benar, sehingga pemberian bantuan tidak salah sasaran.

Masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah disparitas/kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan, tidak meratanya distribusi pendapatan memicu ketimpangan pendapatan yang berpengaruh terhadap ketidakadilan ekonomi dan merupakan awal munculnya kemiskinan.

Tingginya PDRB belum mencerminkan meratanya distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan yang terjadi malah cenderung terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan disuatu negara, namun tidak selalu menjamin kesejahteraan penduduknya karena adanya globalisasi, globalisasi merupakan salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia.

Globalisasi bisa menaikkan pendapatan rata-rata tetapi menimbulkan masalah yaitu

distribusi pendapatan, karena hanya menguntungkan tenaga kerja yang terlatih dan terdidik. Mereka yang tidak terlatih akan tertinggal dan bahkan pendapatan mereka akan menurun. Kesejahteraan dapat diukur melalui pendidikan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, perumahan dan pelayanan sosial. Faktor-faktor tersebut tidak akan terpenuhi tanpa adanya distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu paling kaya dengan individu yang paling miskin. Makin besar jurang pendapatan, makin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidak seimbangan ini terus terjadi antara kelompok kaya dan kelompok miskin maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata. Pemerintah harus menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial serta distribusi pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Di Indonesia, pemerataan pendapatan bisa dilakukan cara-cara antara lain

- a) program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah (misal kebutuhan sandang, pangan, papan, akses

kesehatan dan pendidikan); 2) upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan produksi bahan pangan dibarengi perbaikan infrastruktur, pengembangan benih-benih unggul, pengembangan teknologi pangan, pemberian pupuk bersubsidi; 3) pemenuhan akses kesehatan (Pemerintah menerapkan program jaminan kesehatan masyarakat yang merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; 4) pemenuhan akses pendidikan (pemerintah terus mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan bagi semua masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kemampuan akademik dan pendidikan yang bermutu.

- b) Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas . program ini antara lain dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) guna mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman modal
- c) Program padat karya dan pengembangan industri kecil. Program ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga perkembangan industri kecil menengah akan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Pengembangan Ukm yang melibatkan

banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli, misalnya Kuznets, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh adanya peningkatan produk nasional secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran dari adanya pembangunan ekonomi. Adapun karakteristik pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah, 1) adanya tingkat pendapatan perkapita penduduk yang tinggi. 2) tingkat produktivitas yang tinggi, yang disebabkan oleh kemajuan teknologi 3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, yang bisa dilihat dari pergeseran secara bertahap kegiatan pertanian kepada kegiatan yang bukan pertanian, dan pergeseran dari sektor industri ke sektor jasa. 4) adanya transformasi sosial, politik, dan ideologi.

Perubahan struktur ekonomi ini pada saat bersamaan juga diperlukan adanya perubahan sikap, kelembagaan dan ideologi tertentu, misalnya transformasi sosial bisa dilihat dari adanya urbanisasi secara besar besaran, sikap masyarakat menjadi modern dalam melihat kondisi negara dll.

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini di sajikan dalam bentuk tabel 5.

Tabel 5
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
Goode (1983)	(1)Pengeluaran pemerintah (2) gross domestic produk	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Gross Domestic Pr oduct. Artinya, meningkatnya pengeluaran Pemerintah menyebabkan Produk Domestik Bruto meningkat
Cheng dan LAI, (1997)	(1) pengeluaran pemerintah (2) pertumbuhan ekonomi.	Pengeluaran pemerintah Korea Selatan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran pemerintah Korea

		Selatan meningkat.
Ghalia, (1997)	(1) Pengaruh pengeluaran pemerintah (2) Pertumbuhan ekonomi	Menemukan hubungan searah, yaitu pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi.
Rosyidi (2000)	(1) Pengeluaran Pembangunan (2) Pertumbuhan Ekonomi selama Periode (1979 – 1998)	pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengeluaran pembangunan meningkat dan dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.
Sibarani (2002)	(1) infrastuktur (2) pertumbuhan ekonomi indonesia	Dengan adanya infrastruktur (jalan, listrik, telepon) maka

		pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat
Palupi, (2002)	(1) pengeluaran pemerintah daerah (2) pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan pengeluaran rutin pemerintah, investasi swasta, pengeluaran pembangunan dan tenaga kerja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah meningkat.
Bhinadi, (2003)	(1) modal, (2) kualitas sumber daya manusia tenaga kerja (3) pertumbuhan ekonomi	Modal dan Kualitas sumber tenaga kerja mempunyai kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sutriyono, (2006)	(1) Pengeluaran pemerintah (2) PDRB (1970 – 2003)	Terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran

		<p>pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yaitu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh makin tingginya pengeluaran pemerintah, sebaliknya besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh makin tingginya pertumbuhan ekonomi.</p>
Sodik, (2007)	(1) Pengeluaran pemerintah (2) pertumbuhan ekonomi regional	<p>Pertumbuhan ekonomi regional periode 1993 – 2003 dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, angkatan kerja, dan tingkat</p>

		keterbukaan ekonomi regional. Sedangkan investasi swasta tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Prasetyo dan Firdaus (2009)	(1) Infrastruktur (2) Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia	Tenaga kerja, modal, listrik, jalan, dan air bersih, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya meningkatnya variabel-variabel ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat
Manik dan Hidayat (2010)	(1) pengeluaran Pemerintah (2) pertumbuhan	Meningkatnya pengeluaran pemerintah akan meningkatkan

	ekonomi Sumatera Utara	PDRB dan sebaliknya meningkatnya PDRB akan meningkatkan pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara
Sultan dan Sodik (2010)	(1) Investasi swasta (2) Pengeluaran Pemerintah (rutin dan pembangunan) (3) Pertumbuhan ekonomi	Investasi swasta tidak meningkatkan pertumbuhan ekonominya, dan, 2) pengeluaran Pemerintah menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi
Rustiono (2008)	(1) Investasi swasta (2) Belanja Pemerintahan daerah (3) PDRB	Investasi swasta (PMA, PMDN dan belanja Pemerintahan menyebabkan PDRB meningkat.
Darmayanti (2010)	(1) Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi (pada sektor pertanian) menurunkan

	(2) Kesenjangan Pendapatan	ketimpangan distribusi pendapatan , dan Pertumbuhan ekonomi (pada sektor jasa) menyebabkan ketimpangan ditribusi pendapatan meningkat.
Wahyuni Dan Yuliarni	(1) Pengeluaran Pemerintah (2) Investasi (3) Pertumbuhan ekonomi (4) Kesenjangan Pendapatan	Pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kesenjangan pendapatan di Provinsi
Rubiarko Dan Sakti (2013)	(1) Pertumbuhan ekonomi (2) disparitas pendapatan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan menurunkan disparitas/kesenjangan pendapatan.

Paseki, Naukoko, Wauran (2014)	(1) Dana alokasi Umum (2) Belanja langsung (3) Pertumbuhan ekonomi (4) Kemiskinan	1. Dana Alokasi Umum dan belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Pemerintah menyebabkan penurunan kemiskinan
sasana	(1) Pertumbuhan Ekonomi (2) Kesenjangan antara daerah (3) Tenaga kerja terserap (4) Kesejahteraan kab/kota prov Jawa Tengah	1) Pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan kesejahteraan masyarakat, 2) bila kesenjangan antar daerah meningkat maka kesejahteraan masyarakat di kab/kota Provinsi Jawa Tengah makin menurun.

Nur 2010	(1) Pengeluaran pemerintah, (2) Pertumbuhan ekonomi (3) Distribusi pendapatan.	Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar penduduk di wilayah Indonesia (1994-2003)
Rahman to (2013)	(1) Pertumbuhan ekonomi (2) Belanja negara (3) Inflasi (4) Tingkat kemiskinan (5) Distribusi pendapatan.	1) Terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi, belanja negara dan inflasi dengan tingkat kemiskinan. 2) dalam jangka panjang belanja negara mempunyai pengaruh yang kecil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan dalam jangka pendek belanja negara tidak bisa menurunkan kemiskinan, 3)

		Tidak terbukti hubungan sistimatis antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan.
--	--	---

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama pembangunan wilayah dimana pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui perhitungan terhadap Produk domestik bruto suatu wilayah. Produk domestik bruto diperoleh melalui penjumlahan agregat seluruh sektor-sektor yang mempengaruhinya sesuai dengan persamaan ekonomi terbuka di kembangkan oleh Keynes dan Harrod-Domar yaitu : $Y=C+I+G+ (X-M)$.

Dimana Y = pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Pendapatan Nasional adalah merupakan

Konsumsi merupakan elemen utama di dalam perhitungan pendapatan Nasional, dimana peningkatan agregat konsumsi masyarakat akan ikut menambah pendapatan nasional yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Negara atau wilayah tersebut.

Simpanan masyarakat yang berupa tabungan, deposito maupun giro jika digunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi akan sama fungsinya sebagai investasi yang menyebabkan bertambahnya

output wilayah tersebut sehingga akan meningkatkan pendapatan wilayah itu dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Peranan pemerintah ditunjukkan melalui pengeluaran pemerintah yang terdiri dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung yang digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat . Peranan pemerintah dalam mengalokasikan Belanja langsung dan Belanja tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari.

1. Belanja langsung adalah :

Belanja yang dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja langsung dapat berupa belanja pegawai, personalia, belanja barang/jasa dan belanja perjalanan Dinas. Karakteristik Belanja langsung adalah input alokasi belanja yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan (Halim dan Iqbal 2012 : 32).

2. Belanja tidak langsung adalah :

Belanja yang tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja tidak langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa dan belanja pemeliharaan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan/dalam rangka koordinasi penyelenggaraan

kekurangan pemerintah daerah yang bersifat umum).
(Halim dan Iqbal, 2012 : 33).

3. Pertumbuhan Ekonomi adalah.

Proses kenaikan kapasitas produksi suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Produk Domestik Bruto

4. Distribusi Pendapatan adalah

Merata atau timpangnya hasil pembangunan diantara para penduduknya
(Dumayri, 1999 : 82).

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah.

- (1) Penelitian juga dilakukan oleh Chang dan Lai, (1977) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah Korea Selatan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang tinggi pula.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh Ghalia (1997) bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi, yaitu dengan meningkatnya belanja Pemerintah maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi
- (3) Penelitian juga dilakukan oleh Rosyidi (2000) ditemukan bahwa pengeluaran pembangunan yang meningkat

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang juga meningkat, yaitu dengan meningkatnya belanja pembangunan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

- (4) Penelitian Sibarani (2002) dikemukakan bahwa dengan dibangunnya infrastuktur (jalan, listrik, telepon) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap output (pendapatan perkapita). Artinya, peningkatan pembangunan infrastruktur akan mengakibatkan pendapatan perkapita meningkat sehingga daya beli masyarakat meningkat.
- (5) Penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2002) diperoleh hasil bahwa investasi swasta, pengeluaran rutin Pemerintah, pengeluaran pembangunan dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa bila investasi, pengeluaran rutin dan pembangunan serta kemampuan SDM meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.
- (6) Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2003) menunjukkan bahwa modal mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bila modal yang digunakan untuk investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat

- (7) Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2006), diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan kausalitas (ketergantungan) antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, artinya yaitu tingginya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh makin tingginya pengeluaran pemerintah, dan sebaliknya besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- (8) Penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007) diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1993 – 2003 dipengaruhi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, angkatan kerja dan tingkat keterbukaan ekonomi regional, sedangkan investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya meningkatnya investasi dan konsumsi pemerintah serta meningkatnya angkatan kerja menyebabkan pertumbuhan ekonomi regional meningkat, tetapi investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tidak menaikkan pertumbuhan ekonomi.
- (9) Penelitian oleh Rustiono (2008) diperoleh hasil bahwa investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja Pemerintah berdampak positif terhadap perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Artinya dengan

meningkatnya belanja Pemerintah dan naiknya investasi swasta menyebabkan perkembangan PDRB juga meningkat.

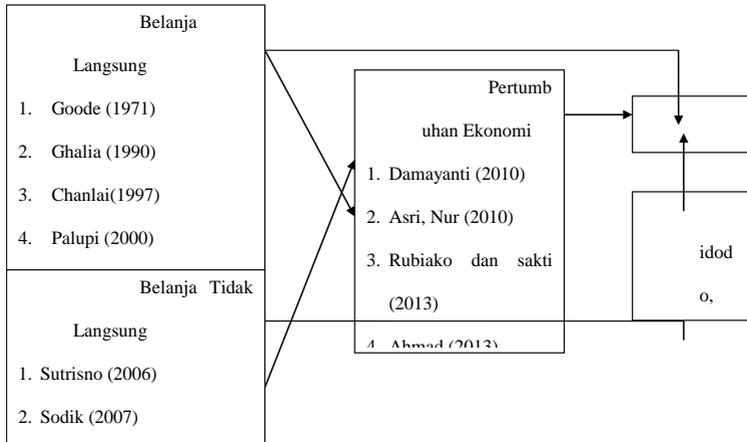
- (10) Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Firdaus (2009) diperoleh hasil bahwa tenaga kerja, modal, listrik, jalan, air bersih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya meningkatnya jumlah tenaga kerja, modal, jalan dan keberadaan air bersih menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.
- (11) Penelitian oleh Manik dan Hidayat (2010) diperoleh hasil bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah menyebabkan PDRB meningkat, dan sebaliknya meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya PDRB juga meningkatkan pengeluaran Pemerintah karena pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat bila perekonomian semakin membaik yaitu berupa investasi untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
- (12) Penelitian oleh Damayanti (2010) diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi (sektor pertanian) berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi (sektor jasa) meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

- (13) Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar penduduk di wilayah Indonesia periode tahun 1994 – 2003 juga meningkat. Artinya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi justru mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan.
- (14) Penelitian oleh Wahyuni dan Yuliarmi (2011) diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah, Investasi dan Perumbuhan Ekonomi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesenjangan pendapatan .
- (15) Penelitian yang dilakukan oleh Rubiarkoo dan Sakti (2013) terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan disparitas pendapatan. Artinya meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan pendapatan. Penelitian oleh Rahmanto (2013) diperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang terdapat pengaruh yang kecil Belanja Negara terhadap kemiskinan, sedangkan dalam jangka pendek tidak

signifikan. Artinya dalam jangka panjang, belanja negara akan mengurangi kesenjangan pendapatan, sedangkan dalam jangka pendek belanja negara tidak dapat mengurangi kesenjangan pendapatan.

(16) Penelitian Paseki, Naukoko dan Wauran (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi DAU dan Belanja Langsung berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Artinya, meningkatnya Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung tidak menaikkan pertumbuhan ekonomi, tetapi menurunkan tingkat kemiskinan.

(17) Penelitian Sasana (2014) menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya kesenjangan antar daerah akan makin menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh Enola (2013) diperoleh hasil bahwa konsumsi, investasi, ekspor, dan inflasi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa meningkatnya konsumsi, investasi, ekspor dan inflasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3 : Kerangka Konseptual

B. Hipotesis

1. Belanja Langsung dan tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Distribusi Pendapatan
3. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap Distribusi Pendapatan
4. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung melalui pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Distribusi Pendapatan

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas menurut Sanusi (2011 : 14-15). Penelitian ini di desain untuk menguji pengaruh belanja daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (sebagai variable eksogen). Kemudian juga menguji pengaruh kinerja keuangan yang dalam hal ini fokus pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Distribusi Pendapatan, dan melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga di desain untuk menjelaskan hasil statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis (kausalitas).

B. Definisi Konseptual

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel eksogen dan variabel endogen serta variabel intervening. Variabel endogennya adalah distribusi pendapatan dan variabel eksogennya adalah Belanja Langsung (X1) dan Belanja Tidak Langsung (X2), serta variable interveningnya adalah pertumbuhan ekonomi (Y) dan variabel endogen adalah Distribusi Pendapatan (Z).

1. Belanja Langsung adalah Belanja yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya program atau kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah

berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (Halim ; 2012 : 32)

2. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah meskipun tidak ada program atau kegiatan oleh pemerintah berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Halim, 2012 : 33).
3. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Produk Domestik Bruto.
4. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat yang di terima oleh masing-masing pemilik faktor produksi (Dumayri : 1999 : 82).

C. Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Langsung adalah alokasi belanja yang di anggarkan dan dapat di ukur dan di bandingkan dengan output yang dihasilkan yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Data Belanja data Belanja Langsung diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur dalam bentuk data time series.
2. Belanja Tidak Langsung adalah alokasi Belanja yang di gunakan secara bersama-sama untuk melakukan seluruh program atau kegiatan unit kerja yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Data Belanja Tidak Langsung diperoleh dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

3. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kapasitas produksi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi meningkat dan pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
4. Distribusi Pendapatan adalah pembagian dari pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi (masyarakat) yang diukur dari tingkat kemiskinan penduduk di Jawa Timur.

D. Populasi Sampel, Ukuran Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi semua kabupaten di Indonesia yang berjumlah 414 kabupaten dan 92 kota, yang totalnya 506 kabupaten/kota. Metode penyampelan (sampling) menggunakan metode purposif sampling dengan kriteria sebagaimana berikut. (1) Semua Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. (2) Laporan keuangannya lengkap (tanpa melihat pendapat akuntan terhadap laporan keuangan).

Sampel menggunakan kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, yaitu terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 38 kabupaten/kota yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur.

E. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan APBD Jawa Timur, dan PDRB Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah pooling data yaitu cross-sectional data yang terdiri dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan time series data selama 6 tahun (2008 - 2013).

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil sampel kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Argumentasinya mengapa Jawa Timur dapat mewakili Indonesia karena pertumbuhan ekonominya masih lebih tinggi daripada provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPS tahun 2014 sebagaimana yang dijelaskan pada bab I (Pendahuluan).

G. Teknis Analisis Data

Langkah – langkah atau prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) melakukan analisis secara deskriptif dan (2) *Path analysis*. *Path analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Distribusi Pendapatan.

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian ini, terlihat bahwa hubungan antar variabel

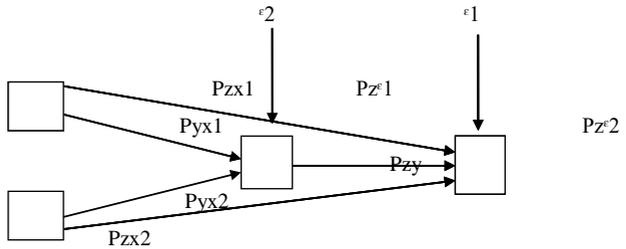
yang menjadi fokus penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan hubungan kausal kompleks dan berjenjang. Hubungan ini melibatkan variabel eksogen yaitu belanja langsung dan tidak langsung diproksi dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, serta variabel endogen yaitu pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang diproksi dengan belanja langsung dan tidak langsung (X_1) dan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang diproksi dengan Belanja Langsung (X_1) Pertumbuhan ekonomi dan Distribusi pendapatan diproksi dengan Belanja tidak langsung (X_2). Untuk variabel semacam tersebut, maka teknik analisis yang dapat dipergunakan adalah menggunakan persamaan teknik estimasi path analysis (Hair et al., 2006).

Adapun langkah-langkah pengujian *path analysis* sebagai berikut.

1. Membuat diagram jalur dan merumuskan persamaan struktural

Berdasarkan rancangan hubungan kausal empiris antarvariabel penelitian

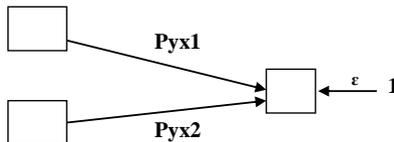
(gambar), maka dibuat jalur lengkap sebagai berikut.



Gambar 4 : Diagram jalur lengkap
Keterangan gambar 4 :

Diagram jalur lengkap tersebut mempunyai dua variabel endogen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan Distribusi Pendapatan (Z) serta dua variabel eksogen yaitu Belanja Langsung (X1) dan Belanja Tidak Langsung (X2).

Berdasarkan hipotesis yang diajukan (pada Bab III) maka dibuat sub struktur yang tujuannya untuk menjelaskan dan mempermudah perhitungan sebagai berikut.

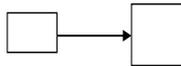


Gambar 5 : Sub Struktur -1. Hubungan Kausal Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Perumbuhan Ekonomi.

Keterangan gambar 5 :

Diagram jalur sub struktur-1 tersebut, mempunyai satu variabel endogen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan dua variabel eksogen yaitu Belanja Langsung (X1) dan Belanja Tidak Langsung (X2).

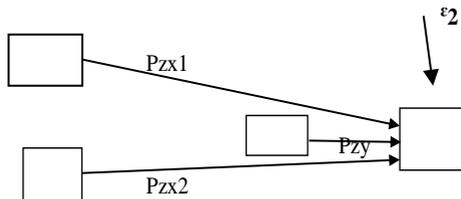
Persamaan struktur : $Y = P_{yx1} X1 + P_{yx2} X2 + P_{y\epsilon} \epsilon$



Gambar 6 : Sub Struktur 2. Hubungan Kausal Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan

Keterangan gambar : 6

Sub struktur 2 mempunyai variabel intervening yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan variabel endogen yaitu Distribusi Pendapatan (Z)

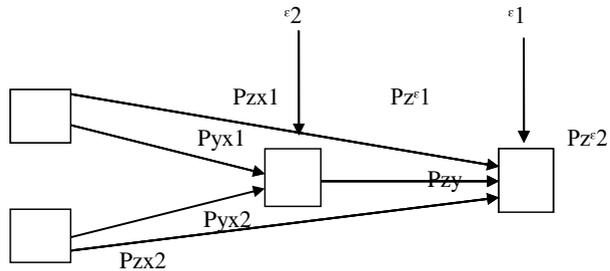


Gambar 7 : Sub struktur-3. Hubungan kausal Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Distribusi Pendapatan.

Keterangan gambar 7:

Sub Struktur 3 mempunyai dua variabel endogen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan Distribusi Pendapatan (Z) serta dua variabel eksogen yaitu Belanja Langsung (X1) dan Belanja Tidak Langsung (X2).

Persamaan struktur : $Z = P_{zx1} X1 + P_{zx2} X2 + P_{zy} Y + P_{ze2} \epsilon_2$



Gambar 8 : Sub Struktur-4. Hubungan Kausal Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Keterangan gambar 8:

Sub Struktur 4 mempunyai dua variabel eksogen yaitu variabel Belanja Langsung (X1) dan variabel Belanja Tidak Langsung (X2), satu variabel intervening yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan satu variabel endogen yaitu Distribusi Pendapatan (Z)

2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi.

Koefisien path di tunjukkan oleh output yang dinamakan coefficient yang dinyatakan sebagai Standardized Coefficient atau dikenal dengan nilai Beta. Penghitungan koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan, menggunakan persamaan regresi berganda, sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + e_i$$

Keterangan :

Y_i : Nilai Variabel dependen dari observasi ke-i

α : Nilai Y bila semua $X_k = 0$

$\beta_1 \dots \beta_k$: Koefisien regresi berhubungan dengan masing-masing variabel independen X_k

X_{ij} : Nilai variabel independen ke-j dari observasi ke-i, dimana $j = 1, 2, 3, \dots, k$

e_i : Random Error dari observasi ke-i

3. Menguji ketepatan model (uji F).

Pengujian ketepatan model dilakukan dengan menggunakan uji F, dengan tingkat

signifikansi α sebesar 5%. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi F dan nilai signifikansi p yang dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Jika nilai signifikansi $p \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya hipotesis yang menyatakan ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel intervening dan terhadap variabel endogen diterima.
- 2) Jika nilai signifikansi $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel intervening dan variabel endogen diterima.

4. Uji Asumsi Klasik.

- 1) Uji normalitas Residual. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent memiliki distribusi normal atau tidak (Kuncoro, 2001 :). Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut.

- a) Jika $p < 0,05$ maka distribusi data tidak normal.
- b) Jika $p > 0,05$ distribusi data normal.

- 2) Uji Heteroskedastisitas. Uji ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001 :).

Heteroskedastisitas bisa di deteksi dengan melakukan analisis grafik dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dan uji Glejser. Jika probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkam model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2001 :).

- 3) Uji Asumsi Autokorelasi. Uji ini untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terjadi korelasi antara satu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$) (Ghozali, 2012 :). Autokorelasi muncul karena akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Secara sederhana, analisis regresi adalah untuk mlihat antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.

Pengujian autokorelasim dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik

hitung Durbin Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin Watson pada tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- a) $1,65 < DW < 2,35$ maka tidak terjadi autokorelasi
 - b) $1,21 < DW < 1,65$ atau $2,35 < DW < 2,79$ maka tidak dapat disimpulkan atau $DW > 2,79$ maka terjadi autokorelasi.
 - c) $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ maka terjadi autokorelasi.
- 4) Uji Asumsi Multikoleniaritas. Uji ini digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel atau semua variabel bebas sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antar variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2001 :). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Untuk mendeteksi multikoleniaritas adalah dengan melihat nilai toleransi dan nilai Variansi Inflation Factor (VIF) dan toleransi. Batas VIF adalah 10, dan nilai toleransi adalah kurang dari 0,1 maka terjadi multikoleniaritas. Bila ada variabel independen yang terkena multikoleniaritas maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model penelitian (Ghozali, 2001 :).

5. Pengujian Hipotesis

a) Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk menguji apabila variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut.

Membuat formula hipotesis

$H_0 : b_i = 0$ (hipotesis nihil) berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat

$H_0 : b_i \text{ tidak } = 0$ (hipotesis alternatif) berarti ada pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

b) Menentukan nilai F-tabel yang menggunakan taraf signifikan sebesar 5 persen. Uji signifikansi secara simultan menggunakan uji F dirumuskan sebagai berikut.

Rumus

Keterangan.

R = koefisien determinasi

K = jumlah variabel

N = banyaknya data

c) Pengambilan keputusan.

Jika $P\text{-value} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Berarti variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Jika $P\text{-value} \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Berarti variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

- d) Uji t. Uji t parsial digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Jika probabilitas nilai t atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka dikatakan terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika probabilitas nilai t atau signifikansinya $> 0,05$ maka dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian signifikansi dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t dan nilai signifikansi p pada level α sebesar 5%, dengan kriteria dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- 1) Jika nilai signifikansi $p \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya hipotesis yang menyatakan ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen diterima
- 2) Jika nilai signifikansi $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh

variabel eksogen terhadap variabel endogen diterima.

- 3) Menguji kesesuaian antar model analisis jalur.
- 4) Merangkum ke dalam tabel.
- 5) Memaknai dan menyimpulkan.

Perumusan hipotesis secara statistik disajikan dalam bentuk tabel 5 yang menunjukkan pengujian hipotesis alternatif H1 sampai dengan H4.

Tabel : 6
Pengujian Hipotesis

Hipotesis Alternatif	Perumusan secara Statistik
H1 : Belanja Langsung dan Tidak Langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	$\rho_{Y.X1.X2} > 0,05$
H1a : Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	$\rho_{Y.X1} > 0,05$
H1b : Belanja tidak Langsung berpengaruh negatif	$\rho_{Y.X2} > 0,05$

terhadap pertumbuhan ekonomi	
H2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan.	$\rho_{zy} > 0,05$
H3 : Belanja Langsung dan Tidak langsung berpengaruh terhadap distribusi pendapatan.	$\rho_{z. x1.x2} > 0,05$
H3a : Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan.	$\rho_{z. x1} > 0,05$
H3b : Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Positif Terhadap Distribusi Pendapatan.	$\rho_{z. x2} > 0,05$
H4 : Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Berpengaruh Terhadap Distribusi Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi	$\rho_{z \cdot y \cdot x1 \cdot x2} > 0,05$
H4a :	$\rho_{z \cdot y \cdot x1} > 0,05$

Belanja Langsung berpengaruh Positif Terhadap Distribusi Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi	
H4b : Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Negatif Terhadap Distribusi Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi	$\rho_{z \cdot y \cdot x2} > 0,05$

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Wilayah Penelitian

Jawa Timur adalah sebuah Provinsi bagian timur Pulau Jawa, dengan ibu kota Surabaya. Adapun luas wilayah Jawa Timur 47.922 km, dengan jumlah penduduk 37.476.757 jiwa (2010). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 Provinsi di Pulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, seta sebelah barat adalah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Jawa Timur meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, serta pulau-pulau kecil di laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung). Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km, lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km

2. Kondisi Perekonomian

Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, di antaranya adalah galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia yaitu PT. PAL di Surabaya, industri besar kereta api terbesar di Asia Tenggara yaitu PT. INKA di Madiun, pabrik kertas Tjiwi Kimia di Sidoarjo, PT Leces di Probolinggo, pabrik rokok (Wisnilak di Surabaya, Gudang Garam di Kediri, Sampoerna di Surabaya dan Pasuruan, Bentoel di Malang).

Jawa Timur juga memiliki pabrik semen terbesar di Indonesia yaitu Semen Indonesia, dan Semen Holcim. Serta Kawasan Kilang Petrokimia. Pemerintah juga sudah menetapkan 12 kawasan Industri Estate antara lain, Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Madiun Industrial Estate Balerejo (MIEB) di Kabupaten Madiun, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, serta Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan.

Sentra industri kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota dan beberapa di antaranya telah menembus ekspor, antara lain industri kerajinan kulit berupa tas, koper dan sepatu di Tanggulangin Sidoarjo,

Jawa Timur juga memiliki tambang minyak terbesar di Indonesia, yaitu Blok Cepu, pembangkit listrik di Jawa Timur di kelola oleh PT. PJB (meliputi PLTA Sutami, selorejo dan Bening), PLTU dan PLTGU yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa-Bali sehingga beberapa daerah menikmati pembangkit energi mikrohidro, dan energi surya.

B. Hasil Penelitian

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan pembangunan ekonomi masyarakat dan menghendaki adanya pendapatan masyarakat meningkat melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi), peningkatan dibidang kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern juga, bahkan berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infastruktur yang berkembang seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi, penyediaan air, listrik dan telekomunikasi.

Dimana dengan adanya infrastruktur yang baik maka masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan lancar, akses jalan yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, bisa menjual barang

dagangannya ke pasar dengan lancar, kemudian masyarakat akan memperoleh keuntungan yang besar yang bisa digunakan untuk memenuhi konsumsi sehari-hari. Selanjutnya masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang ada di pasaran, sehingga permintaan masyarakat ini akan di respon oleh pengusaha dengan menambah barang dan jasa yang di produksi.

Penambahan kegiatan pengusaha memproduksi barang dan jasa akan diikuti oleh peningkatan investasi, juga akan diikuti oleh bertambahnya permintaan tenaga kerja. Sehingga naiknya penyerapan tenaga kerja ini akan mengurangi pengangguran di masyarakat. Kenaikan penyerapan tenaga kerja ini akan diikuti oleh meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang tentunya akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Begitu juga dengan diadakannya pusat-pusat pendidikan, maka masyarakat berkesempatan untuk menyenjam pendidikan yang lebih tinggi, dengan demikian masyarakat makin bisa bersaing di lapangan kerja dan bisa menempati posisi pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Makin berkembangnya perekonomian, akan makin meningkatkan kebutuhan pengusaha terhadap tenaga kerja terampil, dan keterampilan ini bisa diraih dengan pendidikan. Pendidikan baik secara individu maupun secara keseluruhan, pendidikan

merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi, dimana individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang tinggi pula.

Oleh karena itu pemerintah berusaha menaikkan kecerdasan bangsa melalui program-program pendidikan. Tidak kalah pentingnya adalah program-program kesehatan yang diadakan pemerintah yang dimaksudkan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, yang tujuannya adalah kalau masyarakat sehat maka angka harapan hidup menjadi tinggi, sehingga produktivitas masyarakat akan membaik. Peningkatan produktivitas ini akan memberi kesempatan masyarakat untuk bisa bersaing di dunia kerja yang makin tahun makin bertambah dan persaingan semakin ketat.

Harapan pemerintah dengan diadakannya fasilitas –fasilitas kesehatan adalah supaya masyarakat bisa memanfaatkan untuk menaikkan kesehatan, supaya masyarakat bisa menaikkan produktivitas, bisa bersaing di dunia kerja, akhirnya karena masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak maka pendapatan masyarakat meningkat. Meningkatnya masyarakat ini akan menambah konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh para pengusaha, dan para pengusaha memperoleh keuntungan yang bisa digunakan untuk mengadakan investasi lebih lanjut. Selanjutnya investasi ini akan mampu menyerap

tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat ini akhirnya akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Lebih lengkapnya informasi tentang data belanja langsung rata-rata kabupaten/kota bisa dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
APBD dan Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur
2008-2013
(ribu rupiah)

NO	Tahun	APBD	Belanja Langsung
1	2008	29.031.633.996	12.491.160.506
2	2009	31.501.997.754	13.746.654.001.
3	2010	36.877.365.035	12.233.534.597
4	2011	43.163.191.422	14.901.101.681
5	2012	51.126.072.830	18.991.248.434
6	2013	52.919.803.057	23.511.028.370

Sumber : BPS Prov Jawa Timur 2014, *diolah*

Dari tabel 7 bisa di jelaskan bahwa dari tahun ke tahun secara absolut Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan tetapi bila dilihat persentasenya dibanding dengan besarnya APBD berfluktuatif seperti pada tahun 2008 anggaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung

sebesar 43,07 persen. Sedangkan pada tahun 2009 dana yang digunakan untuk membiayai belanja langsung meningkat menjadi 43,64 persen. Peningkatan ini tentu saja sangat menggembirakan karena dengan naiknya belanja langsung berarti pembangunan infra struktur (jalan, listrik, telekomunikasi), pendidikan dan layanan kesehatan semakin meningkat. Pemerintah semakin menyadari bahwa pembangunan infra struktur sangat penting guna menunjang peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pada tahun 2010 anggaran belanja langsung menurun menjadi 33,17 persen, berarti ada penurunan sebesar 10,47 persen. Penurunan ini tentu saja mengakibatkan perekonomian menjadi surut karena pembangunan di bidang infra struktur yang seharusnya naik malah menurun. Hal ini akhirnya menjadikan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi menurun dan berpengaruh terhadap turunya pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2011 anggaran yang digunakan untuk belanja langsung sedikit meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu meningkat 1,35 persen menjadi 34,52 persen. Peningkatan ini tentu saja sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga diharapkan dengan peningkatan belanja langsung maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Pada tahun 2012 anggaran yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk pada belanja langsung meningkat 2,63 persen menjadi 37,15 persen, dan terakhir pada tahun 2013 anggaran untuk belanja langsung meningkat 7,28 persen menjadi 44,43 persen. Peningkatan anggaran belanja langsung ini sangat diharapkan masyarakat Jawa Timur dengan harapan peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja langsung kab/kota di Jawa Timur secara keseluruhan dapat di lihat pada tabel 8

**Tabel 8. : Belanja Langsung Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur 2008-2013**

No		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Pacitan	235.7 32.20 6	193.704 .031	159.926.6 56	277.504.7 77	308.953 .262	267.3 56.415	240.52 9.558
2	Ponorogo	313.4 60.97 6	544.693 .450	205.369.7 31	289.754.3 45	405.879 .863	392.3 58.498	358.58 6.144
3	Trenggalek	293.4 16.12 4	217.312 .153	203.153.0 32	294.469.9 87	325.817 .689	402.3 44.629	289.41 8.936
4	T. agung	332.0 93.39 0	270.311 .299	305.610.8 57	345.493.6 14	546.289 .730	421.8 55.114	370.27 5.667
5	Blitar	393.3 85.91 0	340.860 .249	336.465.3 79	362.369.0 98	470.260 .064	496.6 62.465	400.00 0.528
6	Kediri	341.7 26.18 4	399.249 .869	306.103.2 96	457.888.8 94	498.361 .403	609.8 69.000	435.53 3.108
7	Malang	530.1 71.66 7	472.410 .719	510.763.8 67	582.152.7 07	842.184 .074	833.4 18.860	628.51 6.982
8	Lumajang	259.7 24.28 0	207.579 .541	216.916.6 85	309.933.4 47	324.393 .358	506.9 96.670	304.25 7.330
9	Jember	527.6 72.04 7	471.382 .851	393.148.3 48	569.446.3 04	746.311 .666	952.7 18.565	610.11 3.297
10	B. Wangi	262.5 58.89 5	422.363 .876	297.107.5 56	486.076.5 37	596.185 .641	706.7 39.025	461.83 8.588
11	Bondowoso	202.8 57.07 6	257.827 .214	229.431.0 15	332.586.9 09	398.163 .022	385.7 60.555	301.10 4.299

12	Situbondo	247.373.535	216.741.693	201.773.842	300.711.432	330.204.523	477.235.718	295.673.457
13	Kprobolinggo	292.070.948	306.272.050	244.896.454	427.304.280	502.212.011	511.003.074	380.626.470
14	Pasuruan	417.799.635	390.069.858	470.090.155	602.635.650	574.811.698	707.498.210	527.150.868
15	Sidoarjo	533.122.421	541.226.254	526.566.326	662.794.510	934.183.240	1.273.299.045	745.198.633
16	Mojokerto	372.500.460	299.263.339	216.091.082	345.476.477	435.869.418	587.028.708	376.038.247
17	Jombang	311.649.059	328.415.262	288.760.922	358.389.969	483.218.897	592.764.570	393.866.447
18	Nganjuk	309.034.470	362.395.564	230.004.198	356.001.896	443.748.773	522.259.572	370.574.079
19	Madiun	240.724.172	252.481.598	208.264.998	268.079.921	337.526.072	364.815.332	278.648.682
20	Magetan	203.100.316	485.425.424	189.155.534	304.469.635	295.368.214	339.857.797	302.896.153
21	Ngawi	276.512.544	198.014.947	163.661.937	328.177.976	289.048.260	385.372.066	273.464.622
22	Bojonegoro	390.220.824	326.957.361	330.293.908	430.211.824	677.619.170	1.044.658.644	533.326.955
23	Tuban	359.666.806	350.174.643	347.292.205	383.001.317	551.778.253	579.663.178	428.596.067
24	Lamongan	345.930.341	359.701.649	249.296.126	410.803.190	499.635.534	481.505.306	391.145.358

25	Gresik	340.6 61.18 2	356.897 .531	310.024.8 47	428.053.0 09	527.038 .522	810.5 98.271	462.21 2.227
26	Bangkalan	370.9 06.29 3	312.756 .899	271.024.1 21	526.015.5 71	539.396 .420	626.3 69.934	441.07 8.206
27	Sampang	307.3 74.64 3	367.949 .140	328.688.9 15	344.293.6 01	381.239 .852	513.9 97.572	373.92 3.954
28	Pamekasan	282.1 73.70 4	269.393 .727	227.839.6 18	349.126.3 90	465.329 .845	460.7 08.013	342.42 8.550
29	Sumenep	347.8 96.56 7	282.591 .762	211.316.0 03	307.403.2 62	412.730 .903	515.7 43.017	346.28 0.252
30	Kota Kediri	250.1 33.48 9	280.624 .782	312.332.1 29	283.912.8 69	396.917 .239	420.1 26.138	324.00 7.774
31	Kota Blitar	193.2 56.25 9	193.897 .478	176.132.1 26	294.139.7 21	241.561 .649	282.5 75.454	230.26 0.448
32	K. Malang	328.8 48.14 4	371.411 .671	373.979.5 84	429.180.9 69	603.893 .365	804.0 36.834	485.22 5.095
33	K. Prob.	253.4 46.58 8	265.896 .161	256.166.6 62	306.693.0 64	309.673 .633	307.7 82.688	283.27 6.466
34	K. Pasuruan	152.3 94.26 8	201.333 .243	172.170.3 33	191.089.4 74	196.140 .585	236.9 42.684	191.67 8.431
35	K. Mjker	192.4 50.83 7	260.493 .374	227.741.5 08	209.767.8 46	264.770 .681	316.3 14.777	245.25 6.504
36	K. Madiun	134.3 42.33 2	151.959 .170	204.340.6 54	187.079.8 51	248.278 .643	327.6 82.372	208.94 7.170
37	K. Sby	1.223. 458.7 43	1.988.7 82.528	2.152.111 .633	1.354.535 .224	2.430.9 04.591	3.758. 171.47 1	2.151.3 27.365

38	K. Batu	121.3 13.17 1	227.831 .641	179.522.3 55	204.076.1 34	155.348 .671	286.9 38.129	195.83 8.350	
JUMLAH			12.491.16 0.506	13.746.65 4.00	12.233.53 4.59	14.901. 101.68	18.991. 248.43	23.5 11.0 28.3 70	15 .9 79 .1 21 .2 65
RATA-RATA PROVINSI									420. 03.1 91

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014, diolah

Merujuk tabel 8 diatas maka rata-rata mulai tahun 2008 secara rata-rata Belanja Langsung kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan, dimana Kabupaten/kota ini mempunyai rata-rata Belanja Langsung diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Bisa dijelaskan disini bahwa rata-rata Belanja Langsung terbesar adalah kota Surabaya yang menghabiskan 2.151.327.365 triliun rupiah untuk membiayai program atau proyek-proyek di kota Surabaya.

Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur yang perkembangan ekonominya meningkat maka dibutuhkan peran pemerintah yang makin meningkat pula dan didukung oleh infra struktur yang baik guna melancarkan arus lalu lintas dan arus perdagangan di Surabaya sebagai kota pusat perdagangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Surabaya yang berkembang pesat tentunya membutuhkan dana yang besar untuk keperluan peningkatan infra

struktur guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga sangat wajar bila pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan.

Kemudian kabupaten Sidoarjo menghabiskan anggaran sebesar 745.198.633 miliar rupiah untuk Belanja Langsung yang digunakan untuk pembangunan infra struktur. Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kota udang, juga dikenal sebagai kota industri yang letaknya berdekatan dengan kota Surabaya, membutuhkan sarana infra struktur yang baik guna menunjang perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Malang menghabiskan anggaran pemerintah untuk membiayai Belanja Langsung dengan menghabiskan dana sebesar 628.516.982 miliar rupiah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur demi meningkatkan pendapatan masyarakat. Kabupaten Malang yang juga dikenal sebagai kota pelajar, disamping sebagai kota wisata sangat membutuhkan infra struktur jalan yang memadai guna memperlancar arus lalu lintas guna menunjang aktifitas warga masyarakat.

Pemerintah kabupaten Jember menggunakan anggaran sebesar 610.113.297 miliar rupiah untuk mendanai proyek-proyek di daerah supaya pertumbuhan ekonomi meningkat. Kabupaten Jember menghabiskan dana besar untuk membiayai proyek infra struktur antara lain untuk pembeangunan jalan ganda, juga pembangunan

landasan pacu Bandara Notohadinegoro sepanjang 2 kilo meter dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan dana APBD sebesar 533.326.955 miliar rupiah untuk digunakan mendanai pembangunan proyek infrastruktur jalan di daerah, dimana Bojonegoro merupakan penghasil bahan bakar minyak sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan yang memadai guna menunjang kelancaran arus lalu lintas ke pabrik dan jalan-jalan di kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah kota Malang menggunakan anggaran sebesar 485.225.095 miliar rupiah untuk membiayai Belanja Langsung yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, sehingga kota Batu yang terkenal dengan kota wisata bisa memiliki infrastruktur jalan untuk mengakses ke seluruh tempat-tempat wisata yang ada, dan diharapkan dengan lancarnya akses jalan ini maka pendapatan masyarakat meningkat dan perekonomian meningkat.

Kabupaten Gresik menggunakan anggaran sebesar 462.212.227 miliar rupiah untuk membangun infrastruktur guna memperlancar arus lalu lintas yang digunakan oleh masyarakat guna menunjang perekonomian, dimana di Gresik terdapat perusahaan Petro Kimia yang membutuhkan akses jalan yang bagus supaya arus lalu lintas menjadi lancar dan perekonomian masyarakat meningkat

yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan anggaran belanja untuk mendanai Belanja Langsung sebesar 441.078.206 untuk pembangunan infra struktur jalan guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Kabupaten Bangkalan secara ekonomis sangat diuntungkan dengan adanya jembatan suramadu, karena bisa memperlancar arus lalu lintas yang dulunya harus menyeberang laut, sekarang bisa melewati jembatan. Sehingga dengan adanya jembatan suramadu ini akses jalan menjadi lancar, perekonomian masyarakat meningkat, pendapatan meningkat dan konsumsi juga meningkat.

Kabupaten Kediri menghabiskan anggaran 435.533.108 miliar rupiah untuk pembangunan infra struktur jalan guna melancarkan akses jalan ke daerah lain karena di kabupaten Kediri terdapat pabrik rokok Gudang Garam yang begitu besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dibutuhkan infra struktur jalan yang memadai guna memperlancar arus lalu lintas.

2. Belanja Tidak Langsung

Secara sederhana belanja tidak langsung biasanya di belanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan belanja tidak langsung ini biasanya mengalami kenaikan tiap tahunnya. Belanja Tidak Langsung di kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur ini dari tahun ketahun secara rata-rata mengalami peningkatan. Rata-rata Belanja Langsung dan APBD provinsi Jawa Timur bisa dilihat pada tabel 8

Tabel : 9
Belanja Tidak langsung Provinsi Jawa Timur Jawa Timur
Tahun 2008-2013
(ribu rupiah)

NO	Tahun	APBD	Belanja Tidak Langsung
1	2008	29.031.633.996	10.741.016.280
2	2009	31.501.997.754	17.144.118.888
3	2010	36.877.365.035	25.008.766.270
4	2011	43.163.191.422	25.915.450.107
5	2012	51.126.072.830	30.258.553.763
6	2013	52.919.803.057	33.304.452.174

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014, *diolah*

Berdasar tabel 9 bisa dijelaskan bahwa porsi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 porsi Belanja Tidak Langsung sebesar 36,997 persen dari total APBD, dan meningkat drastis sebesar 17,425 persen menjadi 54,422 porsi APBD digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung. Ini berarti lebih dari 50 persen anggaran digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil.

Pada tahun 2010 porsi anggaran yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung naik lagi sebesar 13,394 persen menjadi 67,816 persen. Peningkatan pengeluaran pemerintah dibidang belanja tidak langsung ini digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri yang pada tahun 2010 terjadi kenaikan penerimaan pegawai di provinsi Jawa Timur.

Tahun 2011 anggaran yang di gunakan untuk membiayai belanja tidak langsung menurun sebesar 7,776 persen menjadi 60,040 persen, tetapi hal ini masih kategori sangat tinggi karena harusnya porsi belanja tidak langsung yang baik adalah tidak melebihi 30 persen dari total APBD. Kemudian pada tahun 2012 porsi belanja tidak langsung kembali menurun dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 59,84 persen sehingga penurunan belanja tidak langsung sebesar 0,856 persen. Tetapi penurunan porsi belanja tidak langsung ini tidak lama karena pada tahun 2013 belanja tidak langsung kembali meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 10,75 persen menjadi 69,934 persen. Peningkatan porsi belanja tidak langsung ini tentunya sangat memprihatinkan karena porsi belanja tidak langsung melebihi porsi belanja langsung.

Tabel 10. : Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2008-2013

N o.	KAB/KOTA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	RATA-RATA
1	Pacitan	351.2 82.97 9	351.282. 979	520.5 15.87 5	570.148 .801	656.00 8.623	706.7 95.94 7	526.005.86 7
2	Ponorogo	492.9 55.19 8	492.955. 198	705.3 43.50 3	771.073 .365	859.17 2.852	974.3 59.56 2	715.976.61 3
3	Trenggalek	407.9 52.11 1	407.952. 111	958.9 56.41 2	643.847 .530	718.29 0.044	640.9 54.80 1	629.658.83 5
4	Tulungagung	505.3 43.86 0	505.343. 860	798.7 50.60 9	903.485 .750	1.030. 605.0 97	986.3 39.57 0	788.311.45 8
5	Blitar	535.5 05.81 3	535.505. 813	759.1 51.60 5	796.069 .962	901.98 6.666	996.5 15.60 9	754.122.57 8
6	Kediri	531.7 96.90 9	531.796. 909	793.4 88.85 5	70.817. 876	989.36 1.132	1.089. 900.2 80	667.860.32 7
7	Malang	807.6 79.07 4	807.679. 074	1.154. 470.9 28	1.252.3 84.197	1.379. 523.0 32	1.551. 661.6 66	1.158.899. 662
8	Lumajang	467.2 86.98 7	467.286. 987	629.6 37.57 1	685.093 .025	776.11 8.753	938.3 14.03 5	660.622.89 3
9	Jember	736.6 65.82 8	736.665. 828	1.110. 566.8 07	1.215.3 87.172	1.341. 520.5 94	1.448. 710.8 35	1.098.252. 844
10	Banyuwangi	661.6 10.80 1	661.610. 801	922.8 57.33 1	956.935 .147	1.086. 820.8 24	1.177. 513.0 00	911.224.65 1
11	Bondowoso	398.0 96.39 9	398.096. 399	536.0 82.96 2	618.371 .248	675.96 3.350	774.9 68.14 3	566.929.75 0

12	Situbondo	322.1 65.47 0	322.165. 470	487.9 47.88 9	537.877 .832	597.06 4.031	659.4 46.79 1	487.777.91 4
13	Probolinggo	427.1 02.71 9	427.102. 719	61649 8434	685.297 .941	788.19 4.976	844.8 49.02 6	631.507.63 6
14	Pasuruan	533.6 72.79 5	533.672. 795	805.9 49.28 1	887.324 .055	989.14 3.843	1.187. 274.9 90	822.839.62 7
15	Sidoarjo	692.1 00.70 2	692.100. 702	1.057. 798.1 10	1.165.9 62.878	1.304. 341.0 46	1.308. 580.6 00	1.036.814. 006
16	Mojokerto	444.1 70.07 1	444.170. 071	664.7 88.22 8	713.283 .888	817.17 3.387	739.9 59.73 4	637.257.56 3
17	Jombang	524.1 95.15 1	524.195. 151	713.1 93.99 7	785.048 .378	880.16 3.495	851.3 62.09 9	713.026.37 9
18	Nganjuk	485.2 35.17 7	485.235. 177	711.2 91.69 2	771.220 .095	905.07 4.987	1.099. 592.5 16	742.941.60 7
19	Madiun	421.2 20.16 2	421.220. 162	561.7 94.87 7	604.637 .981	689.10 2.158	800.5 96.05 4	583.095.23 2
20	Magetan	440.4 10.84 1	440.410. 841	590.3 40.83 5	656.149 .460	769.28 5.749	850.8 21.23 1	624.569.82 6
21	Ngawi	483.8 31.55 7	483.831. 557	722.9 57.24 5	750.351 .129	878.60 0.610	912.7 33.26 0	705.384.22 6
22	Bojonegoro	554.3 05.86 0	554.305. 860	772.2 57.91 2	858.012 .448	1.015. 493.2 06	1.100. 477.3 84	809.142.11 2
23	Tuban	420.5 50.32 6	420.550. 326	657.9 09.66 5	730.241 .578	827.25 4.782	937.7 96.19 0	665.717.14 5
24	lamongan	515.2 00.98 9	515.200. 989	797.4 88.33 9	877.170 .648	974.11 1.861	1.068. 597.7 16	791.295.09 0

25	Gresik	562.9 09.00 7	562.909. 007	774.1 89.45 2	844.913 .410	924.09 2.279	999.8 27.47 6	778.140.10 5
26	Bangkalan	342.5 52.11 6	342.552. 116	522.7 67.86 8	583.006 .973	680.69 3.088	744.5 29.07 0	536.016.87 2
27	Sampang	301.5 88.67 6	301.588. 676	486.2 63.48 9	526.591 .801	610.73 7.288	667.9 13.34 5	482.447.21 3
28	Pamekasan	368.5 73.32 1	368.573. 321	528.5 07.06 0	577.141 .072	634.98 9.536	801.4 95.09 8	546.546.56 8
29	Sumenep	565.4 84.79 8	565.484. 798	736.7 33.32 5	808.650 .881	841.63 0.054	1.002. 986.5 77	753.495.07 2
30	KotaKediri	274.3 86.47 3	307.834. 207	402.7 09.61 4	437.772 .207	446.69 0.739	833.1 31.92 1	450.420.86 0
31	KotaBlitar	162.6 57.39 6	183.508. 270	241.7 94.60 3	239.188 .470	276.65 5.734	296.8 07.27 5	233.435.29 1
32	Malang	358.4 87.35 4	437.716. 515	593.9 96.42 5	619.127 .863	648.41 9.281	739.9 50.30 4	566.282.95 7
33	Probolinggo	165.7 08.87 7	189.140. 093	243.3 03.93 1	272.082 .871	301.49 7.320	364.6 62.57 8	256.065.94 5
34	Pasuruan	170.5 35.10 1	210.931. 908	244.3 87.80 4	282.980 .025	291.77 7.055	293.0 42.67 7	248.942.42 8
35	Mojokerto	127.9 75.87 7	138.569. 053	175.9 74.55 0	199.897 .065	223.61 6.313	254.7 93.97 0	186.804.47 1
36	Madiun	218.6 63.13 8	237.670. 128	301.9 35.29 6	339.766 .221	362.26 3.449	416.4 36.66 7	312.789.15 0
37	Surabaya	795.7 79.54 3	969.713. 597	1.484. 925.3 71	1.446.3 58.681	1.885. 276.6 40	1.961. 927.6 91	1.423.996. 921

38	Batu	165.3 76.82 4	167.589. 420	221.2 38.52 0	231.780 .183	279.83 9.889	278.8 26.48 6	224.108.55 4
JUMLAH		16.741. 016.280	17.14 4.118. 888	25.008. 766.27 0	25.915.4 50.107	30.2 58.5 53.7 63	33.30 4.452. 174	24.728.726.2 47
RATA-RATA PROVINSI								650.755.954

Merujuk pada tabel 10 secara rata-rata belanja tidak Langsung kabupaten/kota di Jawa Timur bisa dijelaskan bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2013 besarnya anggaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung semakin meningkat. Beberapa kabupaten/kota mempunyai belanja langsung di atas rata-rata provinsi, antara lain adalah. Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur secara rata-rata menggunakan dana sebesar 1.423.996.921 triliun rupiah untuk membiayai belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji pegawai negeri di pemerintahan kota Surabaya. Namun bila dibandingkan dengan Belanja Langsung, pemerintah kota Surabaya menghabiskan anggaran lebih kecil dibanding anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja langsung.

Pemerintah kabupaten Malang rata-rata per tahun menggunakan anggaran daerah untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar 1.158.899.662 triliun rupiah untuk menggaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Malang.

Pemerintah kabupaten Jember rata-rata per tahun menghabiskan 1.098.252.844 triliun anggaran untuk membiayai belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji pegawai di pemerintah kabupaten Jember.

Pemerintah kabupaten Sidoarjo menggunakan dana APBD rata-rata per tahun sebesar 1.036.814.066 triliun rupiah untuk membiayai gaji pegawai negeri di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo. Pemerintah kabupaten Banyuwangi menggunakan anggaran daerah untuk membiayai belanja tidak langsung rata-rata sebesar 911.224.651 miliar rupiah yang digunakan untuk gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah kabupaten Pasuruan menggunakan anggaran APBD rata-rata per tahun sebesar 822.839.627 miliar rupiah untuk digunakan membiayai gaji pegawai negeri di lingkungan kabupaten Pasuruan. Pemerintah kabupaten Bojonegoro menggunakan dana APBD untuk membiayai belanja tidak langsung rata-rata per tahun sebesar 809.142.112 miliar rupiah untuk gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah kabupaten Lamongan per tahun rata-rata menggunakan anggaran sebesar 791.295.090 miliar rupiah untuk gaji pegawai negeri di lingkungan kabupaten. Pemerintah kabupaten Tulungagung menggunakan anggaran per tahun rata-rata sebesar 788.311.458 miliar rupiah untuk

digunakan membayar gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Tulungagung.

Pemerintah kabupaten Gresik rata-rata setiap tahun menggunakan anggaran sebesar 778.140.105 miliar rupiah untuk digunakan membiayai gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik. Pemerintah kabupaten Blitar menggunakan dana APBD rata-rata setiap tahun sebesar 754.122.578 miliar rupiah untuk digunakan membiayai gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Blitar.

Pemerintah kabupaten Sumenep rata-rata setiap tahun menghabiskan anggaran belanja sebesar 753.495.072 miliar rupiah untuk membiayai belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep. Pemerintah kabupaten Nganjuk rata-rata setiap tahun menggunakan dana APBD sebesar 742.941.607 miliar rupiah untuk digunakan membiayai gaji pegawai negeri di lingkungan kabupaten Nganjuk.

Pemerintah kabupaten Jombang rata-rata setiap tahun menghabiskan anggaran sebesar 713.026.379 miliar rupiah untuk membiayai gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten Ngawi rata-rata setiap tahun menggunakan anggaran sebesar 705.384.226 miliar rupiah untuk membiayai gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Ngawi.

Pemerintah kabupaten Kediri rata-rata setiap tahun menghabiskan anggaran sebesar 667.860.578 miliar rupiah untuk membayar gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Kediri. Pemerintah kabupaten Tuban rata-rata setiap tahun menggunakan anggaran sebesar 665.717.145 miliar rupiah untuk membiayai gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Tuban. Terakhir pemerintah kabupaten Lumajang setiap tahun rata-rata menghabiskan dana sebesar 660.622.893 miliar rupiah untuk membayar gaji pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dari tahun ketahun mengalami peningkatan . Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan di tabel 9.

Tabel : 11
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi Jawa Timur 2008-2013

NO	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
1	2008	301.544.742,95
2	2009	319.340.132,49
3	2010	340.474.291,67
4	2011	365.672.468,17

ANALISIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI JAWA TIMUR

5	2012	392.471.092,09
6	2013	408.503.067,04

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014, *diolah*

Dari tabel 11 bisa dijelaskan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahu ke tahun. Dimulai pada tahun 2008 jumlah PDRB sebesar 301.544.742,95 ribu rupiah, kemudian meningkat di tahun 2009 menjadi 319,340,132,49 ribu rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Jawa Timur mengalami peningkatan yang berarti pendapatan masyarakat meningkat sehingga kemakmuran masyarakat juga meningkat.

Pada tahun 2010 PDRB mengalami peningkatan menjadi 340.474.291,67 ribu rupiah. Disusul pada tahun 2011 meningkat drastis menjadi 365.672.468,17 ribu rupiah, dan pada tahun 2012 PDRB meningkat lagi secara drastis menjadi 392.471.092,09 ribu rupiah dan terakhir tahun 2013 PDRB mengalami peningkatan menjadi 408 .503.067,04 ribu rupiah.

Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur mengalami kemajuan yang pesat dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga diharapkan peningkatan PDRB ini akan menjadikan Jawa Timur bisa menguasai perekonomian secara Nasional. PDRB Atas Dasar Harga Konstan kabupaten/kota provinsi Jawa Timur bisa di lihat pada tabel 12.

**Tabel 12 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten/Kota Jawa Timur 2008-2013**

no	kab/kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	RATA-RATA
1	Pacitan	1.370.203,62	1.453.314,02	1.548.222,77	1.651.466,07	1.762.562,97	1.868.722,62	1.609.082,01
2	Ponorogo	2.998.668,95	3.148.981,41	3.331.058,41	3.537.868,11	3.768.417,45	3.982.180,05	3.461.195,73
3	Trenggalek	2.735.499,23	2.889.713,40	3.066.326,52	3.264.436,75	3.480.534,54	3.696.796,27	3.188.884,45
4	Tulungagung	5.938.741,79	7.353.502,89	7.829.889,53	8.357.114,68	8.941.209,47	9.534.415,22	7.159.145,60
5	Blitar	9.935.944,23	10.111.362,01	12.308.947,48	13.786.005,89	15.366.477,27	16.868.262,68	11.546.166,59
6	Kediri	5.890.852,58	7.200.360,13	7.635.063,51	8.108.223,96	8.673.840,51	9.239.102,92	7.957.907,27
7	Malang	3.034.488,46	3.718.799,10	4.578.967,81	5.624.096,52	6.786.415,78	7.901.923,01	5.274.115,11
8	Lumajang	5.702.076,22	6.013.672,17	6.369.904,28	6.768.517,45	7.203.528,54	7.672.417,85	6.621.686,09
9	Jember	0.319.002,73	0.891.607,20	1.550.549,44	2.359.522,18	3.250.979,79	4.165.901,52	2.089.593,81
10	Banyuwangi	3.778.833,48	4.370.286,20	4.015.195,17	4.178.649,35	4.638.531,69	5.111.707,90	4.517.200,63
11	Bondowoso	2.836.726,04	2.978.906,80	3.146.982,26	3.341.964,11	3.557.683,76	3.780.574,42	3.273.806,23
12	Situbondo	3.167.290,94	3.330.419,83	3.522.055,33	3.744.411,60	3.989.292,96	4.263.528,37	3.669.499,84
13	Probolinggo	5.014.551,55	5.358.557,90	5.752.163,38	6.172.491,08	6.642.065,55	7.144.551,39	6.014.063,48
14	Pasuruan	5.075.291,88	5.397.872,16	5.790.942,48	6.267.978,60	6.793.273,21	7.336.151,81	6.110.251,69
15	Sidoarjo	3.609.043,24	4.768.319,21	5.161.612,20	5.966.208,68	6.958.884,64	7.067.605,55	5.421.945,59
16	Mojokerto	7.033.745,98	7.400.477,40	7.902.291,18	8.458.152,89	9.067.744,89	9.693.791,99	8.259.367,39
17	Jombang	5.663.243,59	5.962.262,39	6.327.278,13	6.759.495,41	7.230.304,36	7.695.631,33	6.606.369,20
18	Nganjuk	4.696.327,50	4.979.320,58	5.291.794,80	5.631.764,77	6.008.052,22	6.412.117,93	5.503.229,63
19	Madiun	2.759.669,45	2.899.885,98	3.071.607,54	3.268.564,19	3.478.780,54	3.700.327,29	3.196.472,50
20	Magetan	2.935.182,28	3.092.366,16	3.271.278,74	3.472.774,82	3.694.611,37	3.941.145,40	3.401.226,46
21	Ngawi	2.789.335,43	2.942.602,51	3.121.821,49	3.313.434,98	3.531.483,53	3.784.073,13	3.247.125,18
22	Bojonegoro	5.600.791,54	7.267.525,09	8.128.233,06	8.875.105,39	9.379.581,33	9.876.906,84	8.354.690,54
23	Tuban	7.522.332,19	7.972.830,04	8.468.916,06	9.072.283,38	9.636.933,44	10.328.719,82	8.833.669,16
24	Lamongan	5.448.154,70	5.792.095,10	6.191.066,48	6.625.823,03	7.098.168,75	7.588.274,07	6.457.263,69
25	Gresik	4.412.941,49	5.752.846,66	6.837.438,37	8.081.043,89	9.424.161,63	10.811.653,46	7.553.347,58
26	Bangkalan	3.115.331,21	3.269.709,72	3.447.581,93	3.663.027,12	3.894.163,13	4.142.776,95	3.588.765,01
27	Sampang	2.637.506,04	2.759.770,35	2.907.197,05	3.082.741,14	3.271.497,39	3.459.425,75	3.019.689,62
28	Pamekasan	1.953.007,33	2.054.338,88	2.172.396,94	2.307.312,71	2.453.150,29	2.607.103,71	2.257.884,98
29	Sumenep	4.763.580,59	4.975.228,01	5.255.875,27	5.584.051,23	5.937.681,10	6.319.872,81	5.472.714,84
30	kotaKediri	9.742.603,73	10.741.612,81	11.697.339,63	12.710.199,90	13.840.225,57	15.033.724,30	11.085.950,99
31	KotaBlitar	873.374,57	927.579,41	986.211,85	1.051.197,10	1.122.463,45	1.196.230,20	926.176,10
32	KotaMalang	2.446.192,93	3.218.916,86	4.044.625,15	5.038.460,41	6.176.980,57	7.518.916,86	4.024.015,46
33	KotaProlinggo	1.808.452,67	1.905.226,66	2.021.826,54	2.154.854,54	2.303.403,94	2.640.221,00	2.138.997,56
34	KotaPasuruan	1.006.823,61	1.057.446,46	1.117.313,37	1.187.591,86	1.264.355,98	1.346.997,56	1.163.421,47
35	KotaMojokerto	1.101.295,70	1.157.929,82	1.228.437,26	1.310.471,81	1.403.634,21	1.498.132,55	1.169.182,39
36	KotaMadiun	1.864.815,07	1.977.780,63	2.114.843,99	2.266.725,63	2.443.200,18	2.640.372,65	2.217.956,36
37	KotaSurabaya	7.717.873,87	8.014.713,94	8.828.841,77	9.471.049,66	10.167.833,57	10.913.301,87	9.140.269,11
38	KotaBatu	1.244.946,54	1.331.992,60	1.432.193,90	1.547.387,28	1.674.982,52	1.812.314,99	1.507.302,97
JUMLAH		301.544.742,95	330.132,49	404.474.291,07	5.672.468,17	7.214.092,09	8.503.067,04	6.667.632,86
RATA-RATA PROVINSI								9.333.358,74



Merujuk pada tabel 12 bila dilihat kabupaten/kota di Jawa Timur secara rata-rata PDRB bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur di tunjukkan oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto yang meningkat dari tahun ketahun dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Secara rata-rata ada beberapa kabupaten yang PDRB nya diatas rata-rata provinsi. Adapun kabupaten/kota tersebut adalah.

Pemerintah kota Surabaya pertumbuhan ekonomi di tunjukkan oleh besarnya PDRB sebesar 92.140.269,11 juta rupiah yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya sudah sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi suasana perdagangannya begitu pesat. Kemudian disusul oleh kabupaten Sidoarjo yang mempunyai PDRB sebesar 27.421.945,59 juta rupiah. Sidoarjo sebagai kota yang dekat dan berdampingan dengan kota Surabaya dan sebagai kota industri, dimana di kabupaten Sidoarjo terdapat lapangan udara internasional Juanda, sekaligus sebagai kota industri, banyak tenaga kerja yang terserap di industri-industri, maka perekonomian masyarakat bisa maju dan pendapatan masyarakat bisa naik

Pemerintah kabupaten Gresik mempunyai PDRB sebesar 17.553.347,58 juta rupiah. Gresik sebagai kota industri pertumbuhan ekonomi banyak di topang oleh adanya industri-

industri, dan juga oleh PT.PAL, dan Petro Kimia yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pemerintah kabupaten Malang pertumbuhan ekonominya ditunjukkan oleh PDRB sebesar 15.274.115,11 juta rupiah. Malang sebagai kota wisata dan sekaligus sebagai kota pelajar, maka perekonomian bisa meningkat, pendapatan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Kabupaten Jember pertumbuhan ekonominya ditunjukkan oleh besarnya PDRB sebesar 12.089.593,81 yang merupakan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata provinsi. Kemudian pertumbuhan ekonomi kabupaten Blitar ditunjukkan oleh PDRB sebesar 11.546.166,59 juta rupiah, dimana angka ini masih diatas rata-rata provinsi Jawa Timur. Terakhir kabupaten Banyuwangi pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh PDRB sebesar 11.517.200,63 juta rupiah

4. Distribusi Pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan merata atau timpangnya pendapatan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan rata-rata disuatu negara. Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin kesejahteraan penduduk yang bisa dilihat jumlah penduduk miskin yang masih besar. Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi dengan lalu lintas perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur sangat diuntungkan dengan adanya pembangunan yang pesat di bidang infra

struktur (jalan, listik, telekomunikasi), pembangunan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, pembangunan di bidang kesehatan, rumah sakit yang sangat memadai tetapi jumlah penduduk miskin masih merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kondisi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur bisa dilihat pada tabel 13.

Tabel : 13
Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur
2008-2013 (ribuan)

NO	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2008	6076,3
2	2009	6076,3
3	2010	5358,5
4	2011	4831,8
5	2012	3984,1
6	2013	4993

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014

Berdasar tabel 13 bisa dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dimulai tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 6.076,3 juta orang. Kemudian pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin masih sama yaitu sebesar 6.076,3 juta orang.

Kemudian pada tahun 2010 menurun sebesar 717,8 ribu orang menjadi 5.385,5 juta orang.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin berkurang 551,7 ribu orang menjadi 4.831,8. Kemudian pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 847,7 ribu orang menjadi 3.984,1 juta orang. Terakhir pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 1.008,9 juta orang menjadi 4.993.0 juta orang penduduk miskin.

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ini dikarenakan banyak proyek-proyek pembangunan infra struktur yang hanya terpusat di perkotaan dan adanya pusat-pusat perdagangan di perkotaan sedangkan di tingkat pedesaan kurang mendapatkan perhatian pemerintah.

PEMBAHASAN KURANG

**Tabel 14 : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Jawa Timur (ribuan)**

No	KAB/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata
1	pacitan	114,40	114,40	105,40	98,70	93,60	94,50	103,50
2	ponorogo	144,50	144,50	113,0	105,90	100,40	101,40	119,34
3	treggalek	135,20	135,20	108,0	101,20	96,0	96,90	117,13
4	tulungagung	119,10	119,10	105,40	98,70	93,60	94,60	105,08
5	Blitar	150,80	150,80	135,50	126,90	120,30	121,60	134,32
6	Kediri	265,50	265,50	232,80	218,10	206,80	209,00	232,95
7	malang	353,30	353,30	306,80	287,40	272,50	275,50	308,13
8	lumajang	180,70	180,70	140,80	131,90	125,10	126,40	147,60
9	jember	399,50	399,50	311,80	292,10	177,0	280,00	336,58
10	banyuwangi	206,80	206,80	175,10	164,0	155,50	157,20	180,28
11	bondowoso	152,60	152,60	131,90	123,60	117,20	118,50	132,73
12	situbondo	108,90	108,90	105,20	98,60	93,50	94,50	101,60
13	probolinggo	305,10	305,10	276,70	259,20	245,80	248,50	273,40
14	pasuruan	253,50	253,50	199,30	186,70	177,0	179,10	214,42
15	sidoarjo	144,50	144,50	145,50	136,30	129,30	130,50	138,43
16	mojokerto	142,60	142,60	125,40	117,50	111,40	112,70	125,37
17	jombang	205,60	205,60	166,50	156,0	147,90	149,60	175,04
18	nganjuk	191,90	191,90	151,70	142,10	134,70	136,10	158,07
19	madiun	115,30	115,30	102,30	95,80	90,80	91,80	101,88
20	magetan	95,10	95,10	80,30	75,0	71,10	71,80	82,68
21	Ngawi	169,0	169,0	149,20	137,80	130,70	131,70	137,35
22	bojonegoro	292,70	292,70	227,20	212,90	201,90	203,90	238,55
23	Tuban	270,50	270,50	225,80	211,50	200,60	202,70	230,27
24	lamongan		259,70	220,60	206,70	196,0	197,90	221,23
25	Gresik	248,80	248,80	193,90	181,70	172,30	174,40	203,32
26	bangkalan	304,0	304,0	255,60	239,50	227,10	229,80	238,00
27	sampang	302,80	302,80	285,50	267,50	253,70	253,40	277,62
28	pamekasan	213,60	213,60	179,20	167,90	159,20	160,80	182,38
29	sumenep	290,60	290,60	256,70	242,50	230,0	232,20	262,52
30	KotaKediri	30,70	30,70	24,90	23,30	22,10	22,30	25,67
31	KotaBlitar	12,00	12,00	10,10	9,50	9,00	9,10	10,28
32	KotaMalang	57,20	57,20	48,50	45,40	43,10	43,50	49,15
33	KotaProbolinggo	51,30	51,30	41,40	38,80	40,50	24,30	41,27
34	KotaPasuruan	18,90	18,90	16,80	15,70	14,90	15,10	16,72
35	KotaMojokerto	9,80	9,80	8,90	8,30	7,90	8,00	8,78
36	KotaMadiun	11,60	11,60	10,40	9,70	9,20	9,30	10,30
37	KotaSurabaya	209,90	209,90	195,70	183,30	173,80	175,70	191,38
38	KotaBatu	11,30	11,30	9,70	9,10	8,60	8,70	9,78
JUMLAH		5816,60	6076,30	5358,50	4831,80	3984,10	4993,00	5643,09
RATA-RATA PROVINSI								148,50

Berdasar tabel 14, kabupaten/kota provinsi Jawa Timur yang mempunyai jumlah penduduk miskin diatas rata-rata Provinsi di Jawa Timur antara lain kabupaten Banyuwangi, kabupaten Malang, kabupaten Sampang, kabupaten Pasuruan, kabupaten Sumenep, kabupaten Bangkalan. kabupaten Bojonegoro, kabupaten Kediri, kabupaten Tuban, kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik kabupaten Sidoarjo. Secara lebih rinci, kabupaten-kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk miskin di atas rata-rata provinsi bisa di ditunjukkan pada tabel 15

Tabel 15
Kabupaten dengan jumlah rata-rata penduduk
miskin terbanyak di Provinsi Jawa Timur
2008-2013

NO	kab/kota	rata-rata penduduk miskin
1	Banyuwangi	336,58
2	Malang	308,13
3	Sampang	277,62
4	Pasuruan	273,4
5	Sumenep	262,52
6	Bangkalan	238 ,00
7	Bojonegoro	238,55
8	Kediri	232,95
9	Tuban	230,27
10	Lamongan	228,92
11	Gresik	203,32

12	Sidoarjo	214,42
----	----------	--------

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014,
diolah

Dari tabel 15 dijelaskan bahwa secara rata-rata kabupaten/kota yang mempunyai penduduk miskin terbesar adalah. Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur, rata-rata selama enam tahun jumlah penduduk miskin mencapai 336.58 ribu orang, dimana angka ini diatas rata-rata provinsi yang sebesar 148,70 ribu orang. Kabupaten Malang merupakan kabupaten berikutnya yang mempunyai jumlah penduduk miskin sebesar 308,13 ribu orang. Angka ini juga merupakan angka diatas rata-rata provinsi.

Kabupaten Sampang merupakan urutan berikutnya yang mempunyai jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 277,62 ribu orang. Kemudian disusul oleh kabupaten Pasuruan yang mempunyai jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 273,40 ribu orang, dimana jumlah ini masih berada diatas rata-rata provinsi.

Kabupaten Sumenep menduduki urutan berikutnya yang mempunyai jumlah penduduk miskin sebesar rata-rata 262,52 orang dan disusul oleh kabupaten Bangkalan yang mempunyai jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 238,00 orang. Kabupaten Bojonegoro

memiliki jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 238,55 Orang.

Kabupaten Kediri mempunyai jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 232,95 orang. Kabupaten Tuban mempunyai jumlah penduduk miskin secara rata-rata sebesar 230,27 ribu orang. Kabupaten Lamongan jumlah penduduk miskin secara rata-rata sebesar 228,92 ribu orang, terakhir adalah kabupaten Sidoarjo mempunyai jumlah penduduk miskin sebesar 214,12 ribu orang.

Kabupaten Magetan secara rata-rata mempunyai jumlah penduduk miskin sebesar 82,68 yaitu paling sedikit diantara kabupaten seluruh Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur. Sedangkan diantara kota-kota di Jawa Timur yang mempunyai jumlah penduduk miskin terkecil adalah kota Mojokerto yang secara rata-rata sebesar 8,78 ribu orang. Sedangkan kota yang paling banyak jumlah penduduk miskin adalah kota Surabaya sebesar rata-rata 191,38 ribu orang.

Distribusi Pendapatan menurut Bank Dunia

Untuk mengetahui pemerataan pendapatan, Bank Dunia menggunakan persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah, dengan melihat kontribusi penduduk termiskin. Adapun kriterianya adalah. (1) tingkat ketimpangan tinggi, bila kelompok 40 persen termiskin

pengeluarannya kurang dari 12 persen dari seluruh pengeluaran; (2) tingkat ketimpangan sedang, bila kelompok 40 persen termiskin pengeluarannya 12 – 17 persen dari seluruh pengeluaran; (3) tingkat ketimpangan rendah, bila penduduk termiskin pengeluarannya lebih dari 17 persen dari keseluruhan pengeluaran.

Berdasar jumlah pengeluaran penduduk, bisa diketahui berapa hasil perekonomian yang bisa dinikmati oleh penduduk di Jawa Timur.. Hal ini bisa dilihat pada tabel 16

Tabel : 16
Presentase Distribusi Pengeluaran
Pendapatan Jawa Timur
(2009-2013)

	40%	40%	20%
Tahun	Bawah	Menengah	Atas
2009	19.86	37.59	42.55
2010	20.81	38.52	40.67
2011	21.09	38.57	40.34
2012	20.15	34.38	45.47
2013	19.82	34.55	45.63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014,
diolah

Dari tabel 16 bisa di jelaskan kondisi pemerataan pendapatan di Provinsi Jawa Timur versi Bank Dunia ditunjukkan oleh angka persentase 40 persen penduduk

berpendapatan terbawah mulai tahun 2009, sebanyak 40 persen penduduk terbawah menikmati 19.86 persen hasil kegiatan ekonomi, kemudian pada tahun 2010, hasil kegiatan ekonomi yang bisa dinikmati oleh 40 persen penduduk terbawah meningkat menjadi 20.81 persen, dan pada tahun 2011 hasil kegiatan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang bisa dinikmati oleh 40 persen penduduk terbawah menjadi 21.09 persen, disusul pada tahun 2012 hasil kegiatan ekonomi yang bisa dinikmati oleh 40 persen penduduk terbawah Provinsi Jawa Timur menjadi menurun, berada pada angka 20.15 persen, terakhir tahun 2013 hasil kegiatan ekonomi yang bisa dinikmati oleh 40 persen penduduk terbawah menurun lagi dan berada pada angka 19.82 persen. Penurunan ini dikarenakan faktor alam seperti banjir, bencana gunung meletus dan rusaknya infrastruktur.

Sedangkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan di Provinsi Jawa Timur bisa dilihat dari angka rasio Gini seperti tabel 17.

Tabel : 17

**Angka Gini Rasio Menurut Status Wilayah Di Jawa Timur
(Tahun 2009-2013)**

Tahun	Status Wilayah	Gini Rasio Jatim	Gini Rasio Nasional
2009	Kota	0,34	0,37
	Desa	0,26	
	Kota+Desa	0,33	
2010	Kota	0,36	0,38
	Desa	0,26	
	Kota+Desa	0,34	
2011	Kota	0,38	0,41
	Desa	0,37	
	Kota+Desa	0,37	
2012	Kota	0,37	41
	Desa	0,30	
	Kota+Desa	0,36	
2013	Kota	-	0,413
	Desa	-	
	Kota+Desa	0,364	

Sumber: BPS Prov Jatim 2014

Keterangan :	$G < 0,3$	Ketimpangan
Rendah	$0,3 \leq G \leq 0,5$	Ketimpangan
Sedang	$G > 0,5$	Ketimpangan
Tinggi		

Berdasarkan tabel 17 di jelaskan bahwa Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 0,33 persen, kemudian pada tahun 2010 Rasio Gini menjadi 0,34 persen, dan pada tahun 2011 Rasio Gini menjadi 3,37 persen dan disusul pada tahun 2012 Rasio Gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,36 persen dan terakhir pada tahun 2013 Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada angka 0,36 persen. Dari angka-angka Rasio Gini tersebut bisa dikatakan kondisi Provinsi Jawa Timur berada tingkat ketimpangan sedang . Bahkan dibandingkan dengan Rasio Gini Nasional, posisi Provinsi Jawa Timur kondisi ketimpangannya lebih rendah dari pada tingkat Nasional.

Masalah kemiskinan merupakan masalah utama dalam proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Kemiskinan identik dengan ketidak berdayaan secara ekonomi, seperti tingkat konsumsi yang rendah, tingkat kesehatan rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah pula. Kemiskinan sendiri dapat digolongkan sebagai kemiskinan secara absolut ataupun secara

relatif. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan suatu negara. Namun, secara umum ada kesepakatan terutama di negara sedang berkembang bahwa kekurangan modal, merupakan faktor utama pemicu kemiskinan . Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh pembagian pendapatan atau distribusi pendapatan yang timpang. Karena itu kebijakan pemerintah untuk pemerataan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan penduduk antar wilayah.

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi yang dianggap mendekati model pembangunan berimbang (Balanced Development), namun demikian disparitas pendapatan yang relative makin lebar masih dapat dilihat. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi paling miskin di Indonesia pada akhir tahun 1960-an, kondisi ini ditandai dengan jumlah penduduk yang padat, produktivitas yang rendah dan banyaknya daerah yang menderita kemiskinan akut, khususnya daerah pegunungan kapur dibagian utara dan selatan memanjang sampai ke pulau Madura, sehingga dapat dikatakan daerah ini merupakan daerah termiskin di dunia. (Mackie dan djumilah Zain, 1989, dalam Hovard Dick, 1).

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Uji Ketepatan Model

Langkah pertama adalah menganalisis pengaruh X1 (belanja langsung) dan X2 (belanja tidak langsung) terhadap Y (pertumbuhan ekonomi). Berdasar print out pada lampiran diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel: 18
Koefisien regresi belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
 $Y = 1,040 + (-0,111)$

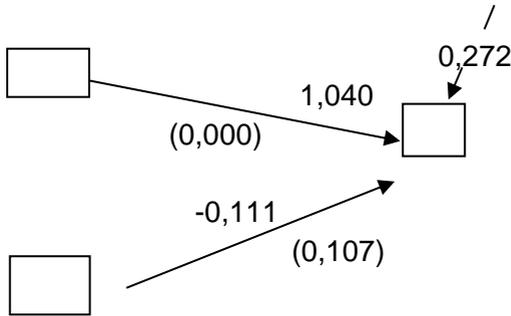
Variabel	Koef Regresi	Sign.	VIF
X1	1,040	0,00	2.13
X2	-0,111	0,107	2,13

$$R = 0,962$$

$$R^2 = 0,926$$

$$\text{Sign.} = 0,000$$

Berdasar tabel 18 hasil analisis regresi tersebut di atas maka gambar model analisis jalur beserta koefisien jalurnya tersaji pada gambar 9.



Gambar : 9 model analisis jalur belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Interpretasi.

- a) Koefisien Regresi X1 (belanja langsung) = 1,040 artinya bila belanja langsung naik 1 persen, pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1,040 persen.
- b) Koefisien regresi X2 (belanja Tidak Langsung) - 0,111 artinya adalah bahwa bila belanja tidak langsung naik 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,111 persen

Catatan: Nilai Koefisien E terhadap Y dicari dengan cara sebagai berikut.

$$E_1 = \sqrt{1-R^2} = \sqrt{1-0,926} = \sqrt{0,074} = 0,272$$

2. Langkah berikutnya melakukan analisis regresi X1 (belanja Langsung, X2 (Belanja Tidak Langsung) dan Y (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Z (Distribusi Pendapatan). Hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 19

Koefisien Regresi

$$Y = 1,009 + 0,770 + e$$

Variabel	Koef Regresi	Sign.	VIF
X1	1,009	0,012	16,768
X2	0,770	0,000	2,300
Y	1,391	0,001	13,52

$$R = 0,806$$

$$R^2 = 0,65$$

$$\text{Sign} = 0,000$$

Dengan nilai VIF di atas 10, ini mengindikasikan terjadi multikolinearitas antar variabel independen oleh karena itu variabel yang nilai VIFnya terbesar dikeluarkan dari model sehingga modelnya menjadi regresi X2 (Belanja Tidak Langsung) dan Y (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Z (Distribusi Pendapatan), hasilnya sebagai berikut.

Tabel 20
Koefisien Regresi
Y =

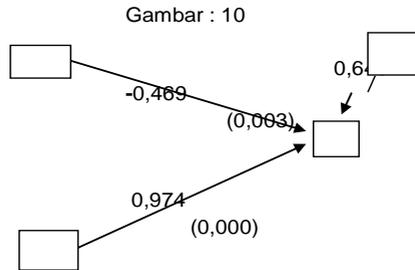
Variabel	Koef Regresi	Sign.	VIF
X2	0,974	0,000	1,720
Y	-0,649	0,003	1,720

R = 0,760
R² = 0,578
Sign. = 0,000

Interpretasi.

- a) Koefisien regresi X2 (Belanja Tidak Langsung) = 0,974 artinya bahwa bila belanja langsung naik 1 persen maka kesenjangan pendapatan naik sebesar 0,974 persen
- b) Koefisien regresi Y (pertumbuhan ekonomi) = - 0,649 artinya bahwa bila pertumbuhan ekonomi naik 1 persen maka kesenjangan pendapatan turun sebesar 64.9 persen.
- c) R = 0,760 artinya
- d) R² = 0,578 artinya bahwa 57,8 persen distribusi pendapatan dijelaskan oleh Belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi, dan 42,2 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasar hasil analisis regresi di atas maka gambar model analisis jalur beserta koefisien jalurnya tersaji pada gambar 10.

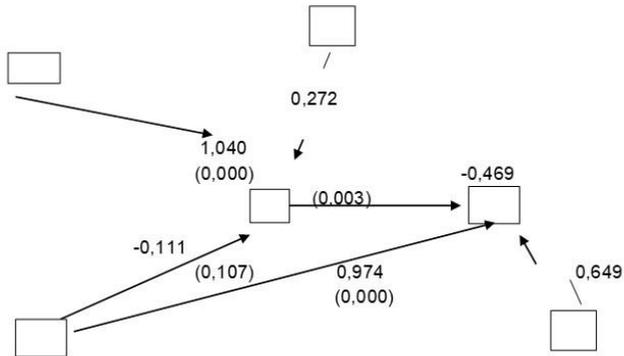


Gambar 10 : model analisis jalur pertumbuhan ekonomi dan belanja tidak langsung terhadap distribusi pendapatan.

Catatan: Nilai koefisien E terhadap Z dihitung dengan cara sebagai berikut.

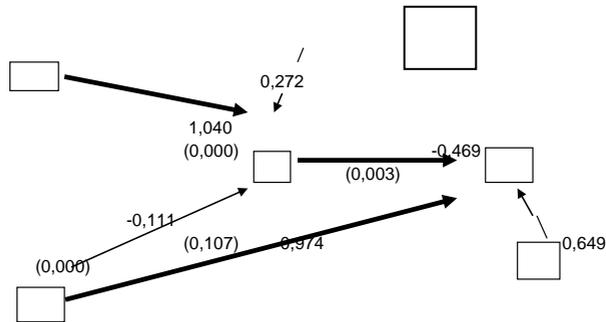
$$E_2 = \sqrt{1-R^2} = \sqrt{1-0,578} = \sqrt{0,422} = 0,649.$$

Jika digabung dengan hasil analisis yang pertama maka akan terbentuk model analisis jalur tersaji pada gambar 11.



Gambar : 11 model analisis jalur belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan

Dengan melakukan analisis trimming yaitu merujuk pada derajat signifikansi koefisien jalur yang lebih kecil dari nilai toleransi sebesar 5 persen maka bentuk akhir dari model analisis jalur tersebut diatas adalah tersaji pada gambar 12.



Gambar : 12 model analisis jalur setelah trimming, belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan

Untuk mengetahui kelayakan model di atas maka perlu dihitung berapa nilai R^2 model tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut.

$$R^2_m = 1 - E_1.E_2 = 1 - 0,272 \times 0,649 = 1 - 0,176 = 0,824$$

Dengan nilai koefisien determinasi model sebesar 0,824 artinya variabel X1 (Belanja Langsung), X2 (Belanja Tidak Langsung), dan Y (Pertumbuhan Ekonomi) mampu menjelaskan variasi dari Z (Distribusi Pendapatan) sebesar 82,4 persen sedangkan sisanya sebesar 17,6 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian ini. Dengan bahasa yang sederhana bahwa variasi belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi

variasi tingkat kesenjangan kemiskinan sebesar 82,4 persen, sedangkan yang 17,6 persen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Variabel lain ini biasa dicari lagi dan dianalisis pada penelitian selanjutnya.

Berdasar gambar 12, maka Y (Pertumbuhan Ekonomi) merupakan intervening dalam hubungan antara X1 (Belanja Langsung) dan Z (Distribusi Pendapatan). Interpretasinya adalah.

- (1) Belanja langsung (X1) tidak berpengaruh langsung terhadap kesenjangan ekonomi (Z) tetapi melalui pertumbuhan ekonomi (Y). Jadi Belanja langsung (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar belanja langsung semakin besar pula pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat.
- (2) Belanja tidak langsung (X2) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan. Jadi semakin besar belanja tidak langsung menyebabkan semakin besar pula kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Uji Signifikansi

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5 persen, maka,

(1) X1 (Belanja Langsung) yang memiliki probabilitas kesalahan 0,000,

(2) X2 (Belanja Tidak Langsung) yang memiliki probabilitas kesalahan sebesar 0,000.

(3) Y (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki probabilitas 0,003.

Karena semua variabel memiliki probabilitas kesalahan < nilai toleransi 0,05 maka H₀ ditolak, dan H₁ diterima.

Sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi diterima.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasar penelitian, bahwa Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berarti semakin tinggi pengeluaran pemerintah yang berupa proyek-proyek infrastruktur (untuk pembangunan sarana transportasi, listrik) yang merupakan infrastruktur dasar yang baik kualitas dan kuantitasnya, maka kegiatan masyarakat menjadi meningkat, pendapatan masyarakat meningkat dan permintaan terhadap barang dan jasa yang di produksi oleh produsen juga meningkat. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa ini mengakibatkan pengusaha menambah investasi, menambah produksinya, dan menambah tenaga kerja untuk menunjang kegiatan perusahaan. Penyerapan tenaga kerja ini

tentu saja akan menaikkan pendapatan masyarakat, menambah kemampuan daya beli masyarakat yang berakibat pada meningkatnya permintaan barang dan jasa dan selanjutnya akan menambah kemampuan pengusaha menambah kapasitas produksi.

Anggaran pemerintah digunakan untuk Belanja Langsung yang digunakan antara lain untuk gaji pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (belanja untuk proyek-proyek daerah) termasuk pengeluaran untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, honor untuk satuan kerja, belanja untuk pembayaran listrik, telepon, air, biaya pemeliharaan mesin, sewa gedung, pembelian Alat Tulis Kantor, pembayaran jasa profesi, biaya perjalanan, pengeluaran untuk pembangunan atau pemeliharaan gedung, tentunya ini bisa meningkatkan permintaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah yang berimbas pada peningkatan produksi.

Belanja Langsung yang digunakan antara lain untuk menggaji pekerja yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya permintaan terhadap produk yang dijual oleh produsen akan meningkat. Hal ini tentunya akan berakibat pada naiknya produksi, dimana kenaikan produksi ini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat

meningkat, konsumsi masyarakat meningkat, yang tentunya disertai peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang di produksi oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Begitu juga pembangunan infrastruktur di daerah tentunya akan memperlancar akses jalan bagi para pelaku dunia usaha, petani, dan masyarakat umum untuk untuk menjalankan aktifitas, memasarkan hasil produksinya sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat dan tentunya pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menaikkan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan menyebabkan meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor industri maupun sektor pertanian dan sektor jasa sehingga pendapatan buruh meningkat, permintaan terhadap barang-barang produksi meningkat sehingga produsen akan meningkatkan produksinya dan seterusnya efek berganda akan terjadi.

Belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infra struktur kebanyakan difokuskan di pusat-pusat industri dan perkotaan, di pusat-pusat perdagangan, sehingga efeknya tidak bisa langsung kepada masyarakat miskin. Kondisi sosial demografis wilayah juga merupakan faktor yang sangat menentukan kinerja transportasi di daerah, dimana tingkat kepadatan penduduk akan berpengaruh terhadap pada kemampuan

transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Tidak kalah pentingnya adalah banyaknya masyarakat perkotaan yang cenderung bekerja di sektor manufaktur dan jasa belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan adanya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, karena selain banyak mempunyai banyak lapangan kerja yang bisa menampung masyarakat untuk bekerja, wilayah perkotaan juga memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Belanja langsung yang di gunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat meskipun porsinya terus bertambah, namun belum bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah yang jauh dari akses jalan. Apalagi masalah pendidikan ini, kebanyakan masyarakat yang kurang berpendidikan menganggap bahwa pendidikan tidak penting tetapi lebih penting bekerja. Padahal dengan adanya pendidikan, kemampuan, daya saing, dan produktivitas masyarakat akan bertambah. Tetapi sangat sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Bahkan di pedesaan ada pemahaman makan tidak makan asal kumpul, dimana pemahaman semacam ini tentunya sangat menyesatkan. Masyarakat tidak berpikir jauh ke

masa depan, tetapi hanya berpikir sesaat. Ini tentunya menjadi tugas pemerintah untuk menghilangkan pemahaman keliru tersebut.

Begitu juga dengan masalah kesehatan, masyarakat masih sulit untuk diajak hidup sehat. Bahkan kebanyakan masyarakat mau ke dokter atau rumah sakit harus menunggu kalau sakitnya parah. Untuk sementara sebelum parah bisa berobat alternatif atau ke dukun, padahal ini tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah memperburuk kesehatan. Tujuan pemerintah untuk menaikkan taraf kesehatan masyarakat kurang di sambut dengan baik oleh masyarakat. Padahal tujuan pemerintah untuk menaikkan taraf kesehatan ini supaya angka harapan hidup meningkat, produktivitas meningkat, dan masyarakat bisa bekerja dengan maksimal dan memperoleh pendapatan yang layak, kesejahteraan meningkat dan bisa dikatakan hidup secara manusiawi. Fasilitas kesehatan yang di sediakan pemerintah kurang mendapat respon dari masyarakat yang kebanyakan masih berfikir bahwa kesehatan tidak perlu, tapi lebih penting bekerja dan menghasilkan uang.

Pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah untuk membiayai belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji pegawai ini kebanyakan digunakan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, yaitu untuk konsumsi. Kalaupun ada peningkatan pendapatan, misalnya guru negeri memperoleh tunjangan profesional berupa sertifikasi, maka gaji tersebut tidak digunakan untuk investasi tetapi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, antara lain digunakan untuk membeli barang-barang yang sudah lama diidamkan, dan barang tersebut sudah ada di pasaran. Ini bisa diartikan bahwa dalam masyarakat ada kecenderungan melakukan potensial demand, yaitu keinginan yang memang sudah ada sejak lama untuk membeli barang yang diinginkan, dan baru terlaksana saat orang memperoleh pendapatan lebih banyak.

Permintaan masyarakat yang bertambah semacam ini tidak akan memicu bertambahnya investasi yang diharapkan akan bisa menyerap tenaga kerja. Padahal investasi dari sektor swasta sangat diperlukan karena diharapkan dengan meningkatnya investasi maka produksi akan bertambah, penyerapan tenaga kerja bertambah dan laju perekonomian akan meningkat dan kapasitas produksi semakin bertambah. Inilah yang menjadi permasalahan di Jawa Timur, kebanyakan masyarakat lebih tertarik untuk melakukan konsumsi dari pada melakukan kegiatan produktif.

Pembangunan sarana fasilitas-fasilitas transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan diharapkan oleh pemerintah bisa memacu

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya kegiatan ekonomi juga ditandai oleh meningkatnya produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan meningkatnya roda perekonomian, serta meningkatnya pendapatan masyarakat akan berdampak pada laju perekonomian yang semakin pesat. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa di pasaran meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk manufaktur termasuk kebutuhan terhadap produk pertanian juga meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin yang berarti distribusi pendapatan semakin merata.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun ada indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan bisa merata dengan adanya pertumbuhan ekonomi

3. Pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap distribusi pendapatan.

Belanja langsung tidak berpengaruh langsung terhadap distribusi pendapatan tetapi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya belanja langsung yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur (mislnya jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, transportasi) langsung mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, menambah produksi barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi masyarakat meningkat, pada akhirnya terjadi penyerapan tenaga kerja dan kesenjangan distribusi pendapatan makin menurun. Belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendapatan masyarakat dari gaji kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk kegiatan yang bersifat produktif yang bisa menyerap tenaga kerja maupun yang bisa menambah kegiatan ekonomi di masyarakat.

4. Pengaruh belanja langsung dan tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan.

Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan, artinya makin meningkatnya belanja tidak langsung maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin

meningkat. Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk gaji pegawai tidak menyebabkan distribusi merata, tetapi malah mengakibatkan distribusi pendapatan semakin tidak merata yang ditandai oleh makin banyaknya jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan belanja tidak langsung digunakan untuk hal-hal konsumtif yang tidak berakibat bertambahnya penyerapan tenaga kerja, dan permintaan masyarakat lebih banyak pada barang-barang manufaktur yang memang sudah ada di pasaran, sehingga naiknya permintaan masyarakat tidak serta merta menaikkan penyerapan tenaga kerja.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan namun ini seringkali diiringi ketidak merataan distribusi pendapatan antar penduduknya karena dalam pertumbuhan ekonomi ada pihak-pihak yang tidak bisa menikmati pertumbuhan ini seperti orang-orang yang kurang berpendidikan yang tidak bisa masuk dunia kerja dan karena ketidak sesuaian antara kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang ditawarkan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya kapasitas produksi dan meningkatnya produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meningkatnya produksi barang dan jasa ini akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang berarti menurunkan jumlah pengangguran. Menurunnya jumlah pengangguran berarti pendapatan masyarakat meningkat dan terdistribusinya pendapatan dengan lebih merata

sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini sesuai dengan konsep Kuznets yang mengatakan bahwa hubungan antara kem

5. Pengaruh belanja langsung dan tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan.

Beberapa cara pemerataan distribusi pendapatan, antara lain; 1) kebijakan fiskal, dengan jalan menerapkan sistim perpajakan yang bersifat progresif, melakukan pembelanjaan yang bersifat membantu golongan masyarakat miskin berupa subsidi, memberikan bantuan yang bersifat mendorong kearah meningkatnya kualitas hidup masyarakat, seperti beasiswa dan pembangunan sekolah-sekolah; 2) transfer uang tunai, dengan cara memberikan subsidi berupa uang tunai kepada orang yang termasuk berpenghasilan rendah; 3) transfer barang, dengan maksud meminimalisir penyimpangan maksud pemberian subsidi yang sesungguhnya; 4) program kesempatan kerja (yaitu pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu).

Berbagai macam program pendistribusian pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah uni harus bisa mencapai sasaran sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat ini adalah adanya pendataan yang benar dari pemerintah, sehingga pemberian bantuan tidak salah sasaran.

Masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah disparitas/kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan dan tidak meratanya distribusi pendapatan, hal ini memicu ketimpangan pendapatan yang berpengaruh terhadap ketidakadilan ekonomi dan merupakan awal munculnya kemiskinan.

Tingginya PDRB belum mencerminkan meratanya distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan yang terjadi malah cenderung terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan disuatu negara, namun tidak selalu menjamin kesejahteraan penduduknya karena adanya globalisasi, globalisasi merupakan salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi bisa menaikkan pendapatan rata-rata tetapi menimbulkan masalah yaitu distribusi pendapatan, karena hanya menguntungkan tenaga kerja yang terlatih dan terdidik, dan masyarakat yang tidak terlatih akan tertinggal dan bahkan pendapatannya akan menurun. Kesejahteraan dapat diukur melalui pendidikan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, perumahan, dan pelayanan sosial. Faktor-faktor ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu paling kaya

dengan individu yang paling miskin. Makin besar jurang pendapatan, makin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidak seimbangan ini terus terjadi antara kelompok kaya dan kelompok miskin maka perekonomian benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Pemerintah harus menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial serta distribusi pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara:

1. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, langkah pertama adalah dengan memodernkan kegiatan ekonomi yang ada, sedangkan langkah yang penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern.
2. Pengembangan infrastruktur
3. Meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat yang rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk

- membayai investasi yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
4. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dari segi individu maupun keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan, maka makin tinggi pula pendapatan yang di peroleh.
 5. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi , kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap awal dari pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan perlu di lakukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang ditentukan.

Di Indonesia, pemerataan pendapatan bisa dilakukan dengan cara
-cara antara lain.

- (1) program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat miskin (misal kebutuhan sandang, pangan, papan, akses kesehatan dan pendidikan); (2) upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan produksi bahan pangan dibarengi perbaikan infrastruktur, pengembangan benih-benih unggul, pengembangan teknologi pangan, pemberian pupuk bersubsidi; (3) pemenuhan akses kesehatan (Pemerintah menerapkan program jaminan kesehatan masyarakat yang merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; (4) pemenuhan akses pendidikan (pemerintah terus mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan bagi semua masyarakat untuk memperoleh pendidikan), dan meningkatkan kemampuan akademik dan pendidikan yang bermutu; (5) Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. program ini antara lain dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) guna mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman modal usaha.
- d) Program padat karya dan pengembangan industri kecil. Program ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga perkembangan industri kecil menengah akan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang

melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli masyarakat.

- e) Peningkatan jalan dan listrik di pedesaan.
- f) Perbaikan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik
- g) Pembatasan pajak dan etribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin
- h) Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin
- i) Membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat pada penduduk miskin
- j) Perbaikan kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah
- k) Mengurangi tingkat kematian ibu pada saat persalinan
- l) Menyediakan lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin
- m) Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Langsung terhadap Perumbuhan Ekonomi serta implikasinya terhadap Distribusi Pendapatan. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan sampel seluruh Kabupaten/Kota berjumlah 38. Berdasar analisis, bahwa Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, artinya, dengan adanya belanja langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga produsen bisa menaikkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya produksi maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2000) yang menyatakan bahwa pengeluaran pembangunan dalam jangka panjang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Juga penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2002), dan penelitian Palupi (2002) yang menemukan bahwa pertumbuhan pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menguji pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar analisis data, bahwa belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini karena belanja tidak langsung yang berupa gaji pegawai tidak digunakan untuk hal produktif tetapi digunakan untuk konsumtif barang-barang yang sudah ada di pasaran.

Menguji pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan belanja tidak langsung yang berupa gaji pegawai tidak digunakan untuk hal yang produktif tetapi digunakan untuk hal-hal yang konsumtif sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu dengan adanya kegiatan ekonomi yang bertambah mengakibatkan pendapatan masyarakat meningkat sehingga ketimpangan distribusi menurun, pendapatan masyarakat meningkat dan terdistribusi kesemua penduduk. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rubiarko dan Sakti (2013) yang

menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Menguji pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Distribusi Pendapatan. Berdasar penelitian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap distribusi Pendapatan, hal ini karena Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung kebanyakan digunakan untuk pembangunan infra struktur di perkotaan dan sangat kurang di pedesaan, dan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif di perkotaan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto (2013) yang menyatakan bahwa dalam jangka belanja negara mempunyai pengaruh yang kecil dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dan dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah tidak bisa menurunkan tingkat kemiskinan.

Menguji pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Distribusi Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Distribusi Pendapatan. Artinya, bahwa makin meningkatnya belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pendapatan masyarakat meningkat dan

terdistribusi dengan baik sehingga ketimpangan distribusi pendapatan menjadi berkurang. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan belanja negara dengan tingkat kemiskinan, artinya dalam jangka panjang belanja negara dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan dalam jumlah kecil

B. Saran

1. pemerintah hendaknya melaksanakn program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial yang ditistribusikan merata kepada penduduk yang berhak.
2. adanya investasi yang padat karya sehingga bisa menyerap tenaga kerja, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
3. hendaknya pemerintah menghidupkan lagi industri-industri kerajinan rakyat (pertukangan, industri rumah tangga) yang disertai bantuan modal dan kredit dengan persyaratan yang mudah dan bunga ringan serta pemasaran hasil produksi.
4. meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah melalui bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, subsidi pangan, keringanan pajak dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Evaluasi Kebijakan Publik*, FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
- Adlein dan Morris, 1973, *Economic Growth and Social Equity Developy Countris*.
- Ahmad, 2013. "Efektifitas Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota Provinsi (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan)". Artikel edisi. 02/tahun XIX/2013. 23 Pebruari 2015.
- Arsyad, Lincoln, 1996, *Analisis Potensi Ekonomi Daerah*, Program Pemses, Yogyakarta: BPFE.
- Asri, Nur, 2010 "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (Kajian Antar Provinsi Di Indonesia Periode 1994 – 2003). *Recipotery,ac.id/1772/ diakses pada tanggal 24 April 2015*.
- Arsyad, Lincoln. 2004, *Ekonomi pembangunan*.Yogyakarta:STIE YKPN.
- Bigsten, Arne., and Sala-i- Martin, 2004, *Economic Growth, Income Distribution, and Poverty : A Review, Working Paper in Economics No. 32. Departement of Economics, Gotebory University. Retrieved Januari*

9, 2005 from <http://rru>, Worldbank, *org/PaperLinks/Economics-Growth-Poverty-Alleviation/*

Barika, 2013, "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran Pemerintah pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera" *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, Vol : 05. No. 01, Januari-Juni 2013. ISSN: 1997-7338, diakses pada tanggal 11 Januari 2015.*

Bird, Richard M dan Francois Vaillancourt, 2000, *Fiscal Decentralization in Developing Countries, United Kingdom : Cambridge University Press*

Bryant, Corolie dan Louis G. White. 1987, *Manging Development in the Third Word*, Terjemahan : Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang oleh Risyant L. Simatupang, LP3 ES, Jakarta.

Chapra.U, 2006, *"The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy"*. A.M ed. *Development Issue in Islam International Islamic University, Kuala Lumpur.*

Chenery, Hollind , 1989, *Industrialization And Growth, Washington : World Bank*

Chenery, 1974, *Redistribution with growth, New York: Oxford University Press*

- Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi I*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Dadey, K. J. 1983, *Financing Regional Government International Practices and Their Relevance To The Third World*. University of Birmingham : Institute of Local Government Studies
- Daryanto, Arief dan Hafrianda. 2012, *Model (Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah) Konsep dan IPB Press*, Kampus IPB Taman Kencana Bogor
- Daryanto, Agus, 2010, Analisis Struktural Kesempatan Kerja Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter, *Jurnal Falsafah Program Pascasarjana/ S3 / IPB*, *Bogor.diakses pada tanggal 13 Agustus 2015*
- Davey, Kenneth. 198, *Persiapan Pemerintah Daerah*, Terjemahan Amanullah, UI Press. Jakarta.
- Devas, Nick. 1989, *Financing Local Government in Indonesia. Planning and Administration (Asia and Pacific Special) Iula Ohio University*
- Depdagri RI, 1997, *Keputusan Mendagri Nomor 690.900.327.1996. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*, Jakarta.
- Dunn, William N, 1999, *Analisis kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dumairy. 1996, *Perekonomian Indonesia Indonesia*. Airlangga, Jakarta.

Emmerson Donald K, 2001, *Indonesia Beyond Solchaet, Negara, Masyarakat, Transisi*, Gramedia Pustaka Utama Bekerja sama dengan The ASIAN Foundation Indonesia. Jakarta.

Halim, Abdul. 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat

Kuznets, 1960, *Modern Economics Growth, Rate, Structure And Spread*.

Ismoro, 2009, *Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan*. Pustaka Unpad.ac.id.upload. 2009/03. Diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

Kuncoro, Mudradjad, 1995, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Prisma. No. 43

Kuncoro, Mudradjad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan Strategi*, Jakarta : Erlangga

Kusworo, 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 2 2 Tahun 1999* Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan Jakarta, Desember 2012.

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. ANDI, Yogyakarta.

Majalah Ekonomi, Moch Misbach Tahun XIX. No 2 Agustus 2009

Milles, Matthew B dan Huberman A. Michel, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press. Cetakan Pertama, Jakarta.

Musgrave, Richard A dan Peggy B Musgrave, 1989, *Public Finance in Theory and Practice. International Edition United States L Mc Graw – Hill. Inc.*

Mudrajad, Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Unit Penerbit Akademi Manajemen Percetakan YKPN.

Nur Janah dan Safiudin, 1998, *Jurnal Manajemen dan Pembangunan Volume VIII Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan Di Provinsi Jambi Suatu Analisis Data Susenas 1993*

Nanga, Muana, 2005, *Mak ro Ekonomi (Teori, Masalah Dan Kebijakan)*. Jakarta. PT. Raja Gravindo Persada

Nanga, Muana, 2006, *Dampak Transfer Fiskal Terhadap kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi kebijakan*

Nur, Asri, 2010, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Ikajian Antar Provinsi di Indonesia 1994

– 2003” artikel. *Recipotery.unand.ac.id/1722/*. 11 Juli 2015*recipotery.ugm.ac.id/index.php/mod* :
penelitian-detail dan sub : Penerbit Perpus UGM.
Diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

Palupi, 2000, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1990 – 2000” Studi Kasus di Kabupaten Purworejo” etd. Diakses pada tanggal 7 juli 2015.

Paseki, 2014, “Pengaruh DAU dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004 – 2014. *E-journal.ac.id/index.php/jbie/article/View/5450*. Vol. 14. No. 3. 4. Diiakses pada tanggal 25 Agustus 2014.

Rahmayanti, (2004), “Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, Permasalahan dan Tantangan (Kementerian BPP, BAPPENAS).

Rika, Darma, 2011, “Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” *EcoSains, Volume. IX. 2 Agustus*. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2015.

Prasetyo dan Firdaus, 2009, “Pengaruh Infra Struktur pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia” IPB e-journal. Volume. 2. no. 2.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53639>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014.

- Rasyid, M.R. 2000, Kebijakan Penyiapan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Penge tahuan. MIPI Jakarta*.
- Romer, David, 2001, *Advanced Macroeconomices, New York : Mc Graw-Hill*.
- Sultan, Sodik, 2010, “Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah di Periode (2000-2004)”. *Buletin Ekonomi Vol. 8. No. 1. April 2014*.
- Sanusi, Anwar 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, penerbit Salemba Empat
- Savitri, Hermansyah dan Mariyaningsih, 2015, “Pengaruh Infrastruktur Jalan dan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume. 17. No. 1. Juli*. diakses pada tanggal 10 Mei 2015.
- Suparmoko, 1996. *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek (Edisi 4)*, BPFE, Yogyakarta
- Sukirno, 2012, *Makro Ekonomi – Teori Pengantar*, Rajawali Press.
- Skuosen, March 2005, *Teori – Teori Ekonomi Modern*, Jakarta, Prenada Media.

Undang - Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia.

Utami, Diah, 2007. "*analisis Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1975 – 2014*", Artikel, Recipotery.ipb.ac.id/handel/123456789/ 9010. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2014.

Widodo, Hg. Suseno T, 1990. *Indikator Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanism, Yogyakarta

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*.

BIODATA PENULIS



Humaidah Muafiqie, Lahir di Kediri, 30 Oktober 1961. Lulus S1 pada program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 1988 di Universitas Darul 'Ulum Jombang. Lulus S2 pada program studi Magister Ekonomi Pembangunan pada tahun 2001 di Universitas

Darul 'Ulum Jombang. Lulus S3 pada program studi Ilmu Ekonomi pada tahun 2016 di

Universitas Merdeka Malang. Meniti karir sebagai dosen di Universitas

Darul 'Ulum Jombang sejak tahun 01 Nopember 1989 sampai sekarang. Jabatan fungsional yang diperoleh adalah Lektor Kepala IV-a pada tahun 2013. Mengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro, Kebijakan Ekonomi Publik, dan Prinsip-Prinsip Ekonomi pada jenjang S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi. Aktif sebagai pembina di berbagai Koperasi dan Kelompok UMKM di wilayah Jombang dan sekitarnya. Aktif menulis di berbagai jurnal Nasional maupun Internasional. Artikel yang berjudul *Expenditure Analysis on Government and Income Distribution in East Java* dan

Empowerment, Service Quality, Job Satisfaction and Performance of Beef Cattle Breeders telah dimuat di

International Conference on Life, Innovation, Change, and Knowledge (ICLICK). Menulis bersama pada bidang sosial pendidikan pada *Journal of Education and Practice : Education and Local Elite Authority: The Study of Traditional Local Elite Strategies in Maintaining Authority of Muslim Communities in Rural Java* Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I di Fakultas Ekonomi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur II di program Pascasarjana Universitas Darul 'Ulum Jombang.